BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah Provinsi Papua sesuai dengan amanat visi dan misi daerah serta dinamika isu strategis yang berkembang

Dalam rangka mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka memantapkan kualitas dan daya saing SDM dengan masyarakat yang terjamin rasa aman, tentram dan damai disertai dengan kehidupan yang demokratis melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Grand Strategi pembangunan daerah Provinsi Papua periode tahun 2018-2023 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 misi pembangunan, 3 orientasi pembangunan, 4 pendekatan pembangunan, 5 prinsip dasar pembangunan dan 3 nilai dasar pembangunan.

PAPUA BANGKIT, MANDIRI, **DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN** Perekonomian Daerah serta Rasa Aman, Tentram, Pembangunan Daerah Sumber Dava Tata Kelola Pengembangan Wilayah dan Damai dalam Tertinggal, Terdepan, berbasis Potensi Unggulan Manusia Pemerintah Kehidupan Demokrasi Terluar dan Tertentu Lokal & kultural 3(TIGA) ORIENTASI PEMBANGUNAN ORIENTASI PERTUMBUHAN & ORIENTASI PEMERATAAN, KEADILAN, & ORIENTASI PEMBANGUNAN MANUSIA POTENSI UNGGULAN KEWILAYAHAN Pendidikan Pertanian dan perkebunan Konektivitas Kelautan dan perikanan Kesehatan Perumahan dan air bersih Kehutanan, Pariwisata Energi dan telekomunikasi Kebudayaan Ketahanan Pangan Industri dan UKM Pengurangan Kesenjangan **DIDUKUNG KONDISI** Tata kelola pemerintahan dan RB Aman, tentram, damai, dan demokratis Kelestarian alam dan budaya PENDEKATAN PEMBANGUNAN Inovasi Afirmasi Desentralisasi NILAI DASAR PEMBANGUNAN PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN Perlindungan Keterpaduan Pemberdayaan Kecukupan Jati diri Kebebasan Keberlanjutan Keberpihakan

Gambar 6.1. Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023

6.1.1 Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan

Untuk pelaksanaan RPJMD Papua 2018-2023, terdapat 6 (enam) Prinsip dasar pembangunan daerah yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan pembangunan, adalah:

 Perlindungan (*Protection*), sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

- 2. Keberpihakan (*Affirmative*), Afirmatif bagi Orang Asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/ golongan lain dalam bidang yang sama.
- 3. Pemberdayaan (*Empowerment*), bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
- 4. Keberlanjutan (*sustainibility*), Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan.
- 5. Keterpaduan (*Integrated*), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua tahun 2018-2023 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu. Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
- 6. Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), bahwa pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun nilai-nilai dasar pembangunan lima tahun kedepan adalah:

- 1. **Kecukupan (Sustenance)**: pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar (basic need) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
- 2. **Jati diri (***Self Esteem***)** : pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau *need achivement*, menghargai diri sendiri dan memiiki rasa percaya diri yg tinggi.
- 3. **Kebebasan** (*Freedom*): pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilainilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas

dalam bersikap dan berprilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

6.1.2 Orientasi Pembangunan

Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu :

1. Orientasi Pembangunan Berpusat pada Manusia.

Pelaksanaan pembangunan sebesar-besarnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Untuk itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat lokal, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghormati hak-hak adat masyarakat setempat. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan difokuskan pada Pendidikan yang bermutu dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah, kemandirian perekonomian masyarakat, dan ketahanan pangan bagi seluruh wilayah di Provinsi Papua akan menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan selama lima tahun ini.

2. Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata sehingga dampak pertumbuhan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan tapi yang paling esensial adalah dampak dari pertumbuhan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui : Perubahan Pola Pikir, Pengwilayahan Komoditas, serta Tanam, Petik, Olah dan Jual. **Perubahan pola pikir** dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola Sumber Daya lokal yang ada disekitarnya sehingga menjadi dapat bernilai ekonomi sekaligus dapat memenuhi kebutuhannya. **Pengwilayahan Komoditas** diartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah. **Tanam, Petik, Olah dan Jual**

dimaksudkan bahwa menyiapkan sistem pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Oleh karena itu Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan lima tahun ke depan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan pembangunan yang terjadi, merupakan suatu indikator antara bukan hasil akhir yang akan dicapai.

3. Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Pembangunan Kewilayahan

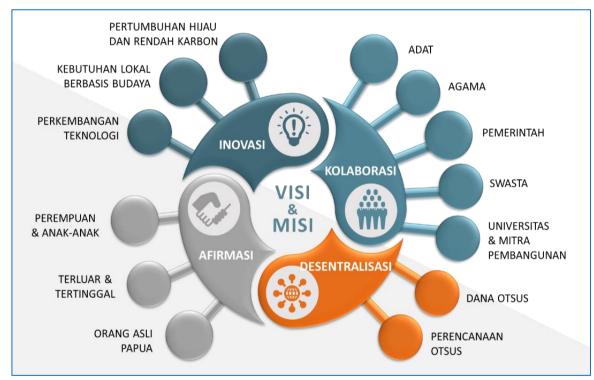
Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung, dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang. Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas berdasarkan 5 (lima) wilayah yaitu 1)La Pago; 2)Mee Pago; 3)Anim Ha; 4)Saereri; dan 5)Mamta. Dalam bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan.

6.1.3. Pendekatan Pembangunan

Pendekatan pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian bauran kebijakan yang mengefektifkan potensi-potensi yang dimiliki daerah di berbagai sektor sehingga akan memberi pengaruh terhadap percepatan pencapaian visi pembangunan daerah. 4 (empat) pendekatan pembangunan yang akan diintensifkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2018-2023 adalah;

1. Inovasi artinya pelaksanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada proses dan hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga akan menambah nilai bagi penciptaan kepuasan bagi masyarakat Papua secara umum;

- 2. Koloborasi artinya pembangunan daerah harus melibatkan partisipasi yang luas dari seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik dari perspektif kelompok adat, agama, pemerintah, swasta, universitas dan mitra pembangunan lainnya. Pada akhirnya kolobaorasi akan memperkuat *sense of belonging* dari semua pihak dan memberi nlai bagi keberlanjutan pembangunan daerah;
- 3. Afirmasi artinya pembangunan daerah harus memiliki keberpihakan terhadap potensi-potensi pembangunan daerah yang memerlukan perhatian lebih yang ini juga sejalan dengan prinsip pelaksanaan otonomi khusus Papua;
- 4. Desentralisasi artinya pembangunan daerah mengelola kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing komponen pemerintahan sehingga mendorong terjadinya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 6.2 Pendekatan Pembangunan Daerah

6.1.4 Strategi Pencapaian Sasaran

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaransasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangun.

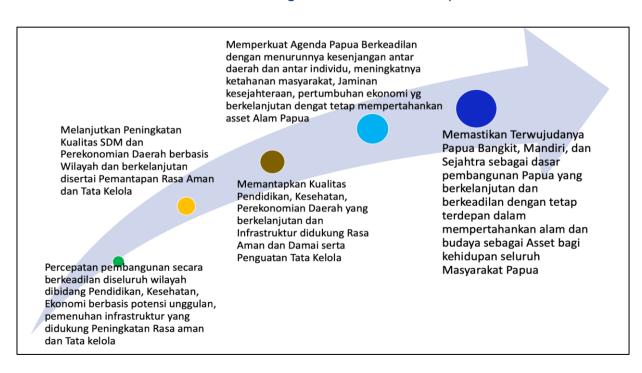
6.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2018-2023 terdiri dari Arah Kebijakan Umum Pembangunan yang mencakup bidang-bidang pembangunan dan Arah Pembangunan Kewilayahan. Tahapan pelaksanaan pembangunan akan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan, sedangkan Arah pembangunan kewilayahan akan menjelaskan arah dan strategi pembagunan kewilayahan berbasis 5(lima) wilayah yaitu 1) La Pago; 2) Mee Pago; 3) Anim Ha; 4) Saereri; dan 5) Mamta.

6.2.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan

Arah kebijakan Provinsi Papua merupakan fokus pembangunan setiap tahun selama lima tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama lima tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar 6.3 sebagai berikut:

Gambar 6.3. Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023



Fokus pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun, akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tema akan disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis daerah serta tema pembangunan Nasional.

Berdasarkan fokus pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan tahunan pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2018-2023

Tubusa		Canada		Charles ai		A	rah Kebijak	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
Misi Pertama, Memantapka	n Kualitas	dan Daya Saing SDM							
Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	S1	Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan	1	Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya.	$\sqrt{}$	V	V		
		Tata Kelola Penyelenggaraan	2	Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Papua	$\sqrt{}$	\checkmark			
		Pendidikan	3	Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan IPTEK di PTN/PTS			\checkmark	\checkmark	\checkmark
			4	Akselarasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	V	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V
			5	Peningkatan pendidikan kecakapan hidup, yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan keterampilan.		\checkmark	\checkmark		
			6	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan		V	V	V	
			7	Perlindungan sosial untuk menjamin generasi emas papua.	\checkmark	√	√	√	√
			8	Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua	√	√	V	√	√
			9	Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama).		V	V	V	V
			10	Peningkatan akses pendidikan melalui guru kunjung, terutama di daerah terpencil.	V	\checkmark	V		
			11	Peningkatan profesionalisme dan tunjangan guru untuk daerah tertinggal dan terluar.		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
			12	Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan	$\sqrt{}$	V	V	√	V

Tubusa		Canaman		Christiani:		A	rah Kebijaka	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
				tunjangan guru					
			13	Peningktan akses dan kualitas pendidikan berbasis e-learning	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V	√
	S2	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	1	Peningkatan budaya baca masyarakat			V	√	
		baca pada masyarakat	2	Perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan pengarsipan				√	√
			3	Peningkatan layanan perpustakaan keliling					
	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V
			2	Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak bencana dan kejadian luar biasa		\checkmark	\checkmark		
			3	Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service, dan telemedicine	√	√	√	√	√
			4	Menyempurnakan dan memantapkan pelaksaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran.	V	√			
			5	Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.		√	V		
			6	Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua.	V	√	V	√	V
			7	Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.	V	V	√	V	√
			8	Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya,			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	

Tubusa		Canada		Churcha ai		A	rah Kebijaka	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
				dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan,					
			9	Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.				√	√
			10	Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat.	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
			11	Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah				√	√
			12	Mendorong penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas kesehatan dengan pola BLUD	$\sqrt{}$	√	√	\checkmark	
			13	Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan	$\sqrt{}$	√	V	V	V
			14	Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	√	√	√	√	√
	S4	Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	1	Pemantapan persiapan pelaksanaaan PON Papua XX Papua	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$			
			2	Penguatan seleksi dan pembinaan bibit bibit muda atlet olahraga berprestasi daerah	√	$\sqrt{}$			
			3	Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia	V	V			
			4	Menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung utama kegiatan PON	$\sqrt{}$	\checkmark			
			5	Menyiapkan promosi dan pengembangan ekonomi	V	√			

Tujuan		Sasaran		Strategi		A	rah Kebijak	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
				berbasis keunggulan komoditas masing-masing wilayah					
	S5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembagunan daerah terutama dalam bidang kewirausahaan	V	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	V
			2	Menumbuhkan talenta-talenta kewirausahaan di kalangan pemuda	√	V	√	√	√
			3	Meningkatkan aktualisasi seni dan budaya pemuda	√	$\sqrt{}$	√	√	\checkmark
			4	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pemuda		√	V	V	
			5	Percepatan peningkatan kapasitas SDM pemuda OAP		\checkmark	\checkmark	\checkmark	
			6	Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan dan pengembangan industri olah raga Indonesia	V	V	\checkmark	V	V
	S6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1	Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar.	V	V	$\sqrt{}$	V	
			2	Perbaikan sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.		√	V	√	
			3	Penguatan petani dan menjaga daya beli serta nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani.		V	V	V	√
			4	Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan diberikan insentif dalam pengembangannya.				√	√
			5	Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan				√	V

Tubusa		Carana		Churcha ai		A	rah Kebijak	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
				akurat dengan resiko yang dapat dijaga.					
			6	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		\checkmark	\checkmark	V	V
	S7	Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli	1	Meningkatkan pembinaan mental dan spritual masyarakat	√	√	√	\checkmark	√
		Papua dalam berbagai bidang kehidupan	2	Pembinaan kelembagaan umat beragama	√	V	V	$\sqrt{}$	V
		masyarakat	3	Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan melalui bantuan kepada lembaga agama dan yayasan pengelola pendidikan keagamaan	V	√	V	V	V
			4	Peningkatan apresiasi terhadap adat dan budaya dalam berbagai bidang kehidupan	\checkmark	V	√	V	√
			5	Penguatan pemberdayaan lembaga adat dan budaya			√	V	√
Misi Kedua, Memantapkan	Rasa Ama	ın, Tentram dan Damai serta	Kehidup	an Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI					
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban	S8	Meningkatnya suasana tertib, aman dan	1	Mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah	√	√	V		
yang berbasis pada kohesivitas sosial dan		kepastian hukum	2	Menumbuhkembangkan ketentraman dan ketrtiban umum		$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	
harmonisasi keberagaman potensi kehidupan			3	Meningkatkan keamanan dan ketertiban swakarsa			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
masyarakat Papua	S9	Meningkatnya Keharmonisan dan	1	mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama, etnik dan kelompok sosial	\checkmark	\checkmark	√		
		kohesifitas masyarakat	2	Meningkatkan penciptaan lingkungan kondusif bagi kehidupan umat beragama	√	\checkmark			
			3	Memperkuat kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok	V	\checkmark	V		
			4	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	\checkmark	\checkmark			

Toloro		0		Otrodoni:		A	rah Kebijak	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
			5	Memperkuat peran adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	√	$\sqrt{}$	√	√	√
	S10	Meningkatnya penegakan HAM	1	Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM	√	\checkmark	V	√	V
			2	Meningkatkan fasilitasi berbagai lembaga pada kasus kasus pelanggaran HAM	√	\checkmark	√	√	√
			3	Peningkatan kesadaran masyarakat pada HAM	V	√	V	V	√
	S11	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan	1	Meningkatkan lingkungan kondusif bagi kehidupan demokrasi lokal	√			V	√
		Lembaga Demokrasi	2	Mempekuat lembaga-lembaga demokrsi daeah serta peningkatan pendidikan politik masyarakat	$\sqrt{}$			\checkmark	\checkmark
			3	Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diagregasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik	√	V	V	V	V
			4	Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	√	V	V	V	V
Misi Ketiga, Penguatan Tat	a Kelola P	emerintahan							
Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang	S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan	1	Memantapkan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan Otonomi khusus Papua	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam		Otonomi Khusus Papua	2	Pemantapan sistem pengalokasian dana otonomi khusus yang efisien, efektif dan berkeadilan	√	\checkmark			
penyelenggaraan pemerintahan daerah			3	Penguatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua	V	V	V	V	V
		4	Pengembangan instrumen kebijakan afirmatif bagi OAP dalam penyelenggaraan otonomi khusus	V	$\sqrt{}$				
			5	Penguatan kelembagaan dan rambu-rambu hukum	$\sqrt{}$	\checkmark			

Tuiter		Carana		Chrodoni:		Aı	ah Kebijak	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
				otonomi khusus Provinsi Papua					
			6	Mendata dan menjamin OAP memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil		V	$\sqrt{}$		
			7	Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan dan memberi insentif jasa lingkungan.	√		V		√
			8	Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	√	V	√	√	
	S13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan	1	Meneruskan reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertangungjawaban publik	V		V		V
		pemerintahan dan pelayanan publik	2	Meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	\checkmark		$\sqrt{}$		
			3	Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah		V		\checkmark	
			4	Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process)		√	√		
			5	Meningkatkan sistem monitoring, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah	\checkmark	V		•	
			6	Meningkatkan tata hukum dan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah		\checkmark		√	
			7	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintah daerah	\checkmark			√	
			8	Meningkatkan upaya fasilitasi penyelesaian tapal batas antar wilayah kabupaten	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	√
			9	Meningkatkan fasilitasi pengembangan potensi ekonomi daerah	V				

Tuines		Sacran		Chrotoni		Α	rah Kebijak	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
			10	Meningkatkan pengembangan sistem pencegahan korupsi	√	√	√	V	\checkmark
			11	Meningkatkan komunikasi dan transparasi informasi kebijakan pemerintah daerah				\checkmark	$\sqrt{}$
			12	Meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online dan transparan	$\sqrt{}$	\checkmark			
			13	Menciptakan fungsi lembaga perwakilan rakyat DPRP dan MRP dalam menjalankan amanah rakyat	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
			14	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan		\checkmark			
			15	Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor	$\sqrt{}$	√			
			16	Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan	V	√	\checkmark	√	\checkmark
			17	Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung	$\sqrt{}$	√	√	$\sqrt{}$	V
			18	Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan	V	V	V	V	√
			19	Memastikan seluruh penduduk Papua, terutama OAP terdata secara terpilah dan memiliki identitas kependudukan			√	√	√
	S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan	1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang terintegratif secara sektoral dan spasial		\checkmark	√		
		pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	2	Memperkuat Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti (evidence base planning) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan	V	V			√
			3	Membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan	. ————————————————————————————————————	√	\checkmark	$\sqrt{}$	

Tuinen		Carana		Chrodoni:		A	rah Kebijaka	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
				daerah					
			4	Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	V	√	√	√	√
			5	Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur	V	√	\checkmark	√	$\sqrt{}$
			6	Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	√	√	√	√	
	S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam	1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP		V	V		
		pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	2	Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas penyusunan APBD	$\sqrt{}$	√	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
			3	Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Papua			V	√	
			4	Memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah bagi ASN	\checkmark	\checkmark	V	√	$\sqrt{}$
			5	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas	√	√	V	V	√
	· ·	oatan Perekonomian Daerah	sesuai P	otensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah I	berbasis Ku	Itural Seca	ra Berkelan	jutan	
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	S16	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan	1	Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektor tanaman pangan/perkebunan/peternakan dengan mutu serta kualitas prima			V	V	V
		ekonomi yang berkualitas	2	Peningkatan produktivitas tanaman pangan/perkebunan/peternakan melalui penerapan	√	$\sqrt{}$	√	\checkmark	√

Tabasa	0	Otroda mi		A	rah Kebijak	an	
Tujuan	Sasaran	Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
		teknologi, serta fasilitasi pemasaran					
		Peningkatan ketahanan pangan di tingkat provinsi yang berbasis penganekaragaman komoditas pangan lokal	V	V	√		
		4 Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan	V	\checkmark	√		
		5 Perbaikan sistem distribusi dan logistik komoditas tanaman pangan/perkebunan/petemakan termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain			V	V	1
		6 Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG Provinsi)			V	√	√
		7 Pengembangan industri hilir tanaman pangan/perkebunan/peternakan melalui insentif pengembangan			\checkmark	V	V
		8 Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V
		9 Pembangunan dan pengembangan klaster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	\checkmark	V	\checkmark	V	V
		10 Penguatan kelembagaan ekonomi petani/peternak untuk peningkatan produktifitas dan pemasaran dalam perekonomian masyarakat lokal.			\checkmark	V	V
		11 Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan komoditas tanaman pangan/perkebunan/peternakan masing-masing Wilayah (mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020)	V	V			
		12 Memantapkan hubungan antar wilayah/daerah/kampung dengan membangun infrastruktur dan keterkaitan sistem produksi dan		V	√	V	

Tuituen		Sanara .		Charles at		A	rah Kebijaka	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
				distribusi komoditas pertanian dan perkebunan, serta pelayanan yang kokoh serta berkesinambungan.					
			13	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		\checkmark	$\sqrt{}$	V	V
			14	Mengembangkan jaringan dan informasi pasar lokal untuk komoditas unggulan pertanian/perkebunan/peternakan di tiap wilayah				V	V
			15	Peningkatan agroindustri lokal yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah.	V	\checkmark	V		
			16	Perbaikan iklim Investasi dan usaha dengan pemihakan kepada sektor UMKM agribisnis sebagai tiang penyerap tenaga kerja terutama OAP.	V	\checkmark	$\sqrt{}$		
			17	Pengembangan industri pertanian/perkebunan/peternakan padat karya			$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark
	S17	Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan	1	Pengembangan industri pertambangan yang berkelanjutan		\checkmark	√	V	
		dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	2	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan		\checkmark	√	√	
			3	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertambangan		V	√	√	
			4	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas		$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
			5	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan		V	V	V	
	S18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	1	Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan		V	V	V	

Tubusa		Canada		Chrodoni		A	rah Kebijak	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
			2	Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)	V	V	√		
			3	Revitalisasi pembangunan rendah karbon			√	\checkmark	√
			4	Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	\checkmark	√
			5	Konservasi sungai dan danau	√	√		√	√
	S19 Meningkatnya	6	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas		√	√	V		
	S19	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara	1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat sekitar hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
	berkelanjutan	2	Optimalisasi konservasi sumberdaya alam hayati			√	V		
		3	Restorasi pembangunan lahan gambut yang berkelanjutan				$\sqrt{}$	√	
	S20	Membangun struktur perekonomian yang	1	Meningkatkan akses tata niaga dan kualitas infrastruktur perdagangan				√	√
		kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama	2	Penguatan kemauan dan kemampuan masyarakat kampung dalam berinovasi dan berproduksi serta mengelola ekonomi lokal yang kuat dan mandiri,			$\sqrt{}$	V	V
	pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa,	pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif	3	Peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah (value added) komoditas	√	V	V	V	
			4	Peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah	V	V	V	V	V
			5	Meningkatkan kemitraan usaha mikro kecil menengah dengan perbankan dan fasilitasi pemasaran produk	V	V		V	√
			6	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi				$\sqrt{}$	$\sqrt{}$

Tuinen		Canada		Chunta ui		Α	rah Kebijak	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
			7	Pengembangan destinasi pariwisata andalan Provinsi Papua	V	V	√		
			8	Pengembangan kepariwisataan diutamakan pada kegiatan ekoturisme yang bernilai tambah tinggi, sehingga secara efeitif dan efisien dapat mendukung upaya pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin	1	√	√		
			9	Pengembangan pusat kegiatan ekonomi berbasis wilayah adat				\checkmark	$\sqrt{}$
			10	Pembangunan dan pengembangan klaster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komodit lokal unggulan			√	V	√
			11	Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI)		$\sqrt{}$	√	\checkmark	$\sqrt{}$
			12	Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian, peternakan, dan perikanan dengan diberikan insentif dalam pengembangannya			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V
	S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi	1	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya	√	\checkmark	√	√	
		maritim dan kelautan yang berbasis pada	2	Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat			√	\checkmark	\checkmark
		pendayagunaan potensi sumberdaya secara	3	Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan			\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
		berkelanjutan	4	Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat				\checkmark	\checkmark
			5	Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi perikanan lokal unggulan			\checkmark	V	V
			6	Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur perikanan		$\sqrt{}$	√	√	
	S22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja,	1	Peningkatan daya saing tenaga kerja disertai dengan perluasan kesempatan kerja		√	√	V	

				20.1.1		Α	rah Kebijak	an		
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023	
		kesempatan dan perluasan kesempatan	2	Peningkatan fasilitasi Penyelesaian konflik industrial			√	√		
		kerja		kerja 3 Perbaikan iklim Investasi dan usaha serta pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja terintegrasi dengan kebijakan bidang urusan lainnya					V	√
			4	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan		V	√	V		
	S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi	1	Peningkatan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah		$\sqrt{}$	V	√		
		pada sektor-sektor andalan daerah	an daerah strategis ekonomi berbasis wilayah adat	Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis ekonomi berbasis wilayah adat			V	V	\checkmark	
		andalan dagran		3	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas		√	V	√	
Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang	S24	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung	1	Meningkatkan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua	V	√	V	V	√	
pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar		pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	2	Memantapkan hubungan antar wilayah/ daerah/ kampung dengan penyediaan infrastruktur transportasi dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah / daerah yang kokoh serta berkesinambungan	V	V	√	V	V	
			3	Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan Masing-masing Wilayah	√	√	V	√	$\sqrt{}$	
			4	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan dengan RTRW Provinsi	√	√	V	√	√	
	S25	Implementasi Rencana Tata Ruang secara	1	Pengendalian pemanfaatan ruang		√	V	√	√	
		konsisten	2	Sosialisasi rencana tata ruang dan penegakan hukum serta konsistensi antara perencanaan dan		√	$\sqrt{}$	V	V	

Tuinen		Canaran		Chunha ai		A	rah Kebijaka	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
				pelaksanaan					
			3	Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan		\checkmark	$\sqrt{}$	V	√
			4	Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang		\checkmark	\checkmark	\checkmark	
			5	Penataan guna lahan permukiman di perkotaan		V	√	V	
	S26	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang	1	Meningkatkan kapasitas daya tampung jaringan irigasi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat		V	V	V	
		mendukung produktivitas wilayah	2	Penyediaan dan pengelolaan air baku	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	\checkmark
		wiiayan	3	Pengendalian banjir dan abrasi pantai	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	
	S27	Meningkatnya Pemenuhan perumahan	1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat		$\sqrt{}$	V	V	√
		layak huni dan penataan pemukiman	2	Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
	S28	Meningkatnya ketersediaan energi	1	Peningkatan ketersediaan energi (listrik / penerangan)	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	
		murah dan energi baru terbarukan	2	Peningkatan energi alternatif				\checkmark	$\sqrt{}$
	S29	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem	1	Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah	\checkmark	\checkmark	√	V	√
		komunikasi dan Informasi antar wilayah	2	Mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi			\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
Misi Kelima, Percepatan Pe	mbangun	an Daerah Tertinggal, Terde	pan, Terlı	uar dan Tertentu					
Meningkatkan pemerataan pembangunan	S30	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis	1	Fasilitasi penataan kelembagaan kampung, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	$\sqrt{}$	V	V	V	√
		kampung	2	Penguatan dan pendampingan tata kelola pemerintahan kampung serta memperkuat peran distrik dalam pembangunan kampung dan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$

Toisse		Communication		C44 !		Aı	rah Kebijaka	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
				pelayanan kepada masyarakat					
			3	Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan.	√	V			
			4	Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.	√	V	√	√	√
			5	Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.		V	V	V	
			6	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		V	V	V	√
			7	Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung	V	V	V	$\sqrt{}$	V
	pe	leningkatnya emenuhan kebutuhan asar bagi OAP	1	Peningkatan akses masyarakat di wilayah pegunungan terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian	√	V	V	V	V
			2	Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
			3	Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	√	V	√	√	√
			4	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		V	V	V	V
			5	Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
		leningkatnya percepatan embangunan wilayah	1	Optimalisasi kerjasama perbatasan dengan negara tetangga			V	$\sqrt{}$	

Tubusa		Canada		Churcha ai		A	rah Kebijak	an	
Tujuan		Sasaran		Strategi	2019	2020	2021	2022	2023
		perbatasan	2	Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.		√	√	√	V
	S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial	1	Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDM yang menangani kesejahteraan sosial	V	V	√		
		PMKS	2	Perluasan aksesibilitas penanganan kesejahteraan sosial yang terpadu dan konprehensif ke arah pemberdayaan masyarakat berketahanan sosial	$\sqrt{}$	V	V	V	\checkmark
			3	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan permasalahan kesejahteraan sosial melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua		V	V	√	V
			4	Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	\checkmark	√	√	√	√
	S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi	1	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota			√	√	V
		bencana melalui upaya pencegahan dan	2	Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengantisipasi kebencanaan			\checkmark	\checkmark	\checkmark
		kesiapsiagaan bencana	3	Pengembangan data dan peta risiko rawan bencana alam di tingkat provinsi			\checkmark	\checkmark	\checkmark
			4	Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah			V	\checkmark	$\sqrt{}$
			5	Fasilitasi rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap bencana		$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	
	S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah	1	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pemberdaayan perempuan dan pelindungan anak melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua		V	V	V	V
		dan Upaya Perlindungan anak	2	Meningkatkan pastisipasi perempuan dalam pembangunan daerah		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$

Tuines	Tujuan Sasaran	Churchani	Arah Kebijakan					
rujuan	Sasaran	Strategi	2019	2020	2021	2022	2023	
		3 Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan		V	√	V	√	
		4 Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak				√	√	

Keterangan: Strategi Prioritas

6.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan

6.2.2.1 Kerangka Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Adat Papua. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.



Gambar 6.4. Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua

Kerangka pengembangan wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) dengan menggali potensi dan keunggulan daerah di setiap wilayah adat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan di wilayah penyangga (*hinterland*) yang diiringi pengembangan lokasi pemasaran, dan peningkatan skill OAP agar aktif terlibat dalam pengembangan sektor unggulan tersebut.
- 2. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang

diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan.

- 3. Peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan PKSN, PLBN, dan lokasi prioritas. Dalam hal ini diperlukan pengintegrasian fungsi PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas, yang didukung penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan lokasi prioritas.
- 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk daerah pinggiran. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan tersebut dilakukan dengan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan insentif dan disinsentif, memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama, serta pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan lokal.
- 5. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang.
- 6. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 7. Pengelolaan urbanisasi dengan memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan, yang disertai pencegahan konflik horizontal, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penyediaan rumah layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan.

Dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua tersebut, terdapat target keberhasilan per wilayah adat yang merupakan hasil berbagai program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.2. Target Kewilayahan

Indikator	Satuan	2017			Tal	ıun			Target	Target Wilayah
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD	
ANIM HA				,						
IPM	Indeks	58.59	59.44-64.44	60.47-65.47	60.95-65.95	62.46-67.46	63.67-68.67	64.21-69.21	65.47	64.21-69.21
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	6.61	6.98-9.98	7.08-9.98	7.18-9.98	7.28-9.98	7.38-9.98	7.48-9.98	6.62	7.48-9.98
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	6.60	6.73-8.00	6.83-8.00	6.93-8.00	7.03-8.00	7.13-8.00	7.23-8.00	7.39	7.23-8.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	29.85	31.08-34.08	32.49-35.49	34.15-37.15	35.73-38.73	37.85-40.85	42.57-45.57	60.94	42.57-45.57
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	29.51	30.73-35.73	32.13-37.13	33.76-38.76	37.33-42.33	42.43-47.43	45.11-50.11	53.43	45.11-50.11
Tingkat pengangguran terbuka	%	3.76	3.69-3.49	2.70-2.50	2.26-2.06	2.06-1.86	1.84-1.64	1.45-1.25	2.00	1.45-1.25
Persentase penduduk miskin	%	20.91	20.52-18.52	20.19-18.19	19.69-17.69	19.42-17.42	18.97-16.97	18.70-16.70	23.98	18.70-16.70
LA PAGO										
IPM	Indeks	44.88	48.77-53.77	49.28-54.28	50.85-55.85	51.21-56.21	52.37-57.37	53.28-58.28	65.47	53.28-58.28
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	5.65	5.96-8.51	6.21-8.51	6.46-8.51	6.71-8.51	6.96-8.51	7.21-8.51	6.62	7.21-8.51
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	5.65	5.84-7.00	6.09-7.00	6.34-7.00	6.59-7.00	6.84-7.00	7.09-7.00	7.39	7.09-7.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	10.50	10.73-14.23	11.33-14.83	11.87-15.37	12.38-15.88	13.06-16.56	16.94-20.44	60.94	16.94-20.44
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	10.40	11.76-18.76	13.22-20.22	13.75-20.75	15.26-22.26	17.94-24.94	23.80-30.80	53.43	23.80-30.80
Tingkat pengangguran terbuka	%	1.14	1.24-1.04	1.07-0.87	1.14-0.94	0.99-0.79	0.63-0.43	0.55-0.35	2.00	0.55-0.35
Persentase penduduk miskin	%	36.30	35.81-25.81	35.37-25.37	34.82-24.82	34.34-24.34	33.83-23.83	33.28-23.28	23.98	33.28-23.28
MEE PAGO										
IPM	Indeks	57.21	60.41-65.41	61.15-66.15	62.27-67.27	63.33-68.33	64.01-69.01	65.03-70.03	65.47	65.03-70.03
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	3.32	4.17-6.67	4.42-6.67	6.46-6.67	6.71-6.67	6.96-6.67	5.42-6.67	6.62	5.42-6.67
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	5.90	6.09-7.00	6.34-7.00	6.59-7.00	6.84-7.00	7.09-7.00	7.34-7.00	7.39	7.34-7.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	69.47	72.37-74.87	75.50-78.00	79.15-81.65	82.60-85.10	87.19-89.69	94.01-96.51	60.94	94.01-96.51
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	20.13	21.38-26.38	22.81-27.81	23.98-28.98	26.75-31.75	30.11-35.11	37.03-42.03	53.43	37.03-42.03
Tingkat pengangguran terbuka	%	2.90	2.99-2.79	2.25-2.05	2.00-1.80	1.83-1.63	1.55-1.35	1.30-1.10	2.00	1.30-1.10
Persentase penduduk miskin	%	32.32	31.81-21.81	31.28-21.28	30.90-20.90	30.49-20.49	30.10-20.10	29.49-19.49	23.98	29.49-19.49

Indikator	Satuan	2017			Tal	ıun			Target	Target Wilayah
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD	
IPM	Indeks	65.74	66.34-71.34	67.08-72.08	68.75-73.75	69.11-74.11	70.16-75.16	71.04-76.04	65.47	71.04-76.04
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	0.96	5.07-7.35	5.32-7.35	6.46-7.35	6.71-7.35	6.96-7.35	6.32-7,35	6.62	6.32-7,35
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	0.97	1.72-5.00	1.97-5.00	2.22-5.00	2.47-5.00	2.97-5.00	3.47-5.00	7.39	3.47-5.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	33.21	34.43-37.93	35.74-39.24	37.28-40.78	38.74-42.24	40.72-44.22	46.26-49.76	60.94	46.26-49.76
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	33.00	35.22-40.22	36.52-41.52	38.05-43.05	41.49-46.49	45.46-50.46	52.97-57.97	53.43	52.97-57.97
Tingkat pengangguran terbuka	%	5.30	4.80-3.30	4.06-2.56	4.11-2.61	3.94-2.44	3.92-2.42	3.73-2.23	2.00	3.73-2.23
Persentase penduduk miskin	%	30.12	29.73-22.73	28.89-21.89	28.47-21.47	27.72-20.72	26.99-19.99	26.49-19.49	23.98	26.49-19.49
MAMTA										
IPM	Indeks	65.55	66.52-71.52	67.87-72.87	68.35-73.35	69.49-74.49	70.69-75.69	71.50-76.50	65.47	71.50-76.50
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	6.27	6.61-9.37	6.71-9.37	6.81-9.37	6.91-9.37	7.01-9.37	7.11-9.37	6.62	7.11-9.37
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	6.29	6.49-8.00	6.59-8.00	6.69-8.00	6.79-8.00	6.89-8.00	6.99-8.00	7.39	6.99-8.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	46.74	48.75-51.75	51.06-54.06	53.76-56.76	56.33-59.33	59.75-62.75	66.11-69.11	60.94	66.11-69.11
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	50.39	52.70-56.70	55.43-59.43	58.61-62.61	61.65-65.65	65.65-69.65	70.79-74.79	53.43	70.79-74.79
Tingkat pengangguran terbuka	%	8.93	7.86-5.86	6.88-4.88	6.93-4.93	6.45-4.45	6.02-4.02	5.84-3.84	2.00	5.84-3.84
Persentase penduduk miskin	%	16.96	16.58-14.58	16.12-14.12	15.68-13.68	15.14-13.14	14.70-12.70	14.27-12.27	23.98	14.27-12.27

6.2.2.2. Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

pengembangan kewilayahan Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan umum pembangunan berkelanjutan "Green Growth berbasis wilayah adat" diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua, khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan sektor ekonomi berkeadilan antar secara dan berkelanjutan.

SAMUDERA PASIFIK PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) TIMIKA: pusat jasa, pusat pengolahan, KSN & simpul transportasi utama untuk Papua bagian selatan JAYAPURA: pusat jasa, pusat pengolahan, simpul utama transportasi skala nasional PUSAT KEGIATAN NASIONAL PROMOSI (PKNp) WAMENA: mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah PKW BIAK: KSN, kawasan andalan, potensi pengembangan pariwisata MERAUKE: mendorong percepatan pertumbuhan bagian selatan PKN PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW) MUTING: pusat pelayanan wilayah bagian selatan NABIRE: pusat pelayanan wilayah bagian barat SARMI: pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah Kawasan strategis pengembangan PUSAT KEGIATAN WILAYAH PROMOSI (PKWp) wilayah rendah karbon **DEKAI, KEPI, ENAROTALI, & WARIS:** Kawasan strategis untuk Dipromosikan menjadi PKW (pusat distribusi barang kepentingan daya dukung KW dan jasa untuk beberapa kabupaten), karena lingkungan hidup memiliki fasilitas perkotaan yang memadai Kawasan strategis PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) untuk kepentingan MPKNp pusat kegiatan industri, pusat jasa, dan simpul pertumbuhan ekonomi transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan

Gambar 6.5. Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua

Tabel 6.3. Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Papua

PUSAT			WILAYAH ADAT		
PERTUM- BUHAN	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	berpotensi mend	kawasan internasional orong perkembangan w ngan kegiatan jasa, pusa	·	npul transportasi deng	an skala pelayanan nasiona
Pusat	atau beberapa pr		Timika di Kab. Mimika KSN simpul transportasi utama yang melayani Papua bagian selatan	Kota Jayapura dan Kab. Jayapura simpul utama transportasi skala nasional dengan adanya pelabuhan laut dan bandara Sentani	an skala pelayanan nasiona
Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	Wamena di Kab. Jayawijaya mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah Papua	Merauke mendorong percepatan pertumbuhan di bagian selatan Papua			BiakKSNkawasan andalan, potensi pengembangan pariwisata
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)		Muting di Kab. Merauke • pusat pelayanan wilayah bagian selatan	Nabire pusat pelayanan wilayah barat menunjang willayah sekitarnya dengan adanya jalan, pelabuhan, dan bandara	elayani skala provinsi a Sarmi pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah	tau beberapa kabupaten
Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	KEDUDUKAN: dipro Dekai di Kab. Yahukimo • pusat simpul masuknya barang dan jasa • pusat pengembangan industri di wilayah selatan	mosikan menjadi PKW Kepi di Kab. Mappi ibukota Kab. Mappi	Enarotali di Kab. Paniai pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak	Waris di Kab. Keerom • memiliki fasilitas perkotaan memadai	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	• simpul transportasi	ustri dan jasa yang mela i yang melayani skala ka pupaten yang tidak tern	Ibupaten atau beberap	pa kecamatan.	

6.2.2.3 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan SDM di Papua untuk mewujudkan "green growth berbasis wilayah adat" dan pengembangan klaster ekonomi dilakukan dengan pembentukan SDM unggul melalui center of knowledge, politeknik agroindustri, technopark, SMK pertanian, dan balai latihan kerja yang terletak di lokasi-lokasi strategis dalam pembentukan klaster ekonomi setiap wilayah adat.

Secara umum SDM di klaster pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata di Papua harus menguasai kompetensi dasar untuk dapat menjalankan kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran. Selain itu, keberadaan pusat klaster yang membantu memberikan informasi mengenai peluang pasar untuk hasil produk budidaya olahan pertanian tersebut mengharuskan para pelaku usaha pertanian menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak harus dipelajari secara mandiri, namun terdapat lembaga antar klaster yang menjalin kemitraan dengan berbagai aktor yaitu pemerintah, pelaku usaha pertanian eksternal, akademisi, swasta, organisasi sosial, dan lembaga keuangan eksternal untuk membantu SDM pelaku usaha pertanian. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi, namun juga dalam bentuk studi banding, penelitian & pengembangan, investasi, serta memberi bantuan input (benih, pupuk, modal, teknologi, dll). Kemitraan tersebut diharapkan dapat mendorong SDM pelaku usaha pertanian di Papua yang saling bertukar input, output, pengetahuan, informasi dan teknologi serta bekerja sama dengan pelaku usaha pertanian eksternal, sehingga dapat tercipta SDM yang kompeten, kompetitif, dan inovatif dalam implementasi green growth berbasis wilayah adat.

Tabel 6.4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

		WILAYAH ADAT								
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI					
Politeknik Agroindustri terakreditasi B	Wamena di Kab. Jayawijaya* (*opsional)	Kab. Merauke* (*opsional)								
Technopark sebagai center of excellence sektor unggulan klaster ekonomi	V	V	V	V	V					
SMK pertanian, pariwisata,	Wamena di	Kab. Merauke	Timika di	Kab. Jayapura	Kab. Biak					

			WILAYAH ADAT		
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
dan/atau pertambangan	Kab. Jayawijaya		Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Sarmi	Numfor
Balai Latihan Kerja (BLK)	Wamena di Kab. Jayawijaya Kab. Yahukimo	Kab. Merauke Kepi di Kab. Mappi Kab. Boven Digoel	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura	Kab. Biak Numfor
Lembaga standarisasi mutu					Kab. Biak Numfor

Tentu saja strategi pembangunan pendidikan menengah dan tinggi di atas tidak mengabaikan strategi yang saat ini telah dilakukan untuk mendukung pendidikan dasar, yaitu melalui penguatan sekolah kecil dan sekolah berasrama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan karakteristik wilayah, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan kearifan lokal masyarakat Papua. Dalam implementasi upaya peningkatan tersebut diperlukan peran aktif masyarakat khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal. Secara umum, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan pemberian tunjangan tenaga kesehatan, penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana kesehatan, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pengembangan obat-obat tradisional, serta pencegahan dan penanggulangan enyakit menular HIV Aids, TB paru, dan malaria.

Tabel 6.5. Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Papua

		,	WILAYAH ADAT		
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
RSUD tipe A				Kota Jayapura	
RSUD tipe B	V	V	V		V
Rumah sakit pratama	Kab. Tolikara	Mindiptana di Kab. Boven Digoel	Kab. Dogiyai	Kab. Sarmi	Kab. Supiori
	Kab. Pegunungan				
	Bintang	Muting di			
		Kab. Merauke			

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Rumah sakit mata				Kota Jayapura	
Rumah sakit jiwa		Kab. Merauke	Kab. Mimika	Kota Jayapura	
Sarana kesehatan terapung		V		V	
Sarana kesehatan keliling				V	V

Sebagaimana bidang pendidikan, penguatan di bidang kesehatan skunder juga paralel dengan strategi pengembangan kesehatan primer dan kesehatan berbasis masyarakat melalui skema dukungan otonomi khusus.

6.2.2.4 Pengembangan Perekonomian Wilayah

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (*cluster*) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

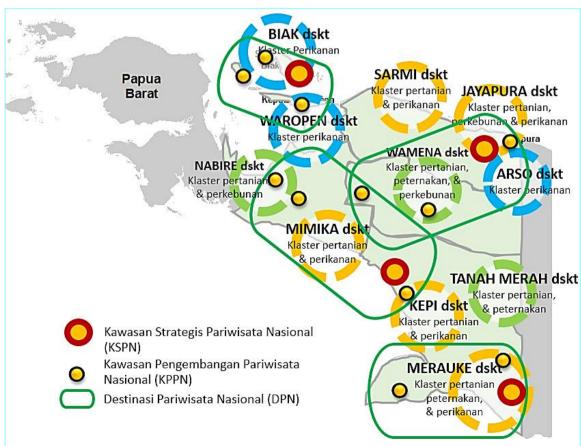
Dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua, setiap wilayah dan pelaku usaha saling terhubung dan membentuk jejaring dalam memanfaatkan potensi lokal, sehingga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi multisektor dan manfaat kolektif. Adapun manfaat kolektif yang diperoleh dari terbentuknya klaster adalah sebagai berikut (Porter, 1998):

- a. **Efisiensi**: kedekatan geografis akan berdampak terhadap pengurangan biaya operasional (transportasi dan komunikasi) dan biaya produksi, serta memungkinkan efisiensi lainnya berupa pembiayaan bersama (*cost sharing*) dan pembagian risiko (*risk sharing*);
- b. **Produktivitas**: sebagai dampak dari kemudahan yang diperoleh (*specialized labor pool, specialized input supplier, and technological supplier*) maka para pelaku usaha dapat fokus kompetensi untuk meningkatkan produktivitas. Pelaku usaha di dalam klaster akan lebih produktif dalam menggunakan input; mengakses informasi, teknologi dan institusi yang dibutuhkan; berkoordinasi dengan

stakeholder terkait; dan memiliki motivasi di dalam melakukan perbaikan (improvement);

c. **Inovatif**: merupakan *output* dari interaksi sinergis antar *stakeholder* di dalam klaster, termasuk keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang akan meningkatkan kemampuan kolektif.

Tantangan dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua adalah dampak yang tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek sehingga diperlukan upaya lebih agar klaster ekonomi terbentuk secara berkelanjutan. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Klaster tersebut memiliki jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan, tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi.



Gambar 6.6. Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua

Tabel 6.6. Pengembangan Perekonomian Wilayah

			WILAYAH ADAT		
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
PENGEMBANGAN	PEREKONOMIAN	WILAYAH BERBASIS I	KOMODITAS LOKAL		
Sektor Primer	kopi, buah merah, ubi jalar, sagu	padi, karet, kopi, tebu, perikanan, peternakan, kelapa sawit	kopi, buah merah, ubi jalar, tambang, perikanan, sagu	kakao, kelapa dalam, kelapa sawit, perikanan	hasil Laut, perIkanan
Sektor Sekunder	industri pengolahan sagu, buah merah,ubi jalar, kopi	industri pengolahan tebu, kelapa sawit, peternakan, dan pengalengan ikan	industri pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan/ atau perkebunan	industri pengolahan ikan dan hasil perkebunan	industri kayu, pengolahan ikan
Sektor Tersier	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa
PENGEMBANGAN	KLASTER EKONOM	MI DI PAPUA			
Klaster Pertanian	Wamena dan sekitarnya	 Tanah Merah dan sekitarnya Kepi dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya 	Nabire dan sekitarnyaMimika dan sekitarnya	Sarmi dan sekitarnya Jayapura dan sekitarnya	
Klaster Perkebunan	Wamena dan sekitarnya		Nabire dan sekitarnya	Jayapura dan sekitarnya	
Klaster Peternakan	Wamena dan sekitarnya	Tanah Merah dan sekitarnyaMerauke dan sekitarnya			
Klaster Perikanan		Kepi dan sekitarnyaMerauke dan sekitarnya	Mimika dan sekitarnya	 Sarmi dan sekitarnya Arso dan sekitarnya Jayapura dan sekitarnya 	Biak dan sekitarnyaWaropen dan sekitarnya
Klaster Pariwisata	 KPPN Timika- Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya KPPN Jayawijaya di Kab. Jayawijaya KPPN Wamena di Kab. Jayawijaya 	 KSPN Wasur- Merauke dan sekitarnya di Kab. Merauke KPPN Kimaam dan sekitarnya di Kab. Merauke KPPN Danau Bian dan sekitarnya di Kab. Merauke 	 KPPN C.A. Weyland dan sekitarnya di Kab. Nabire KPPN Paniai dan sekitarnya di Kab. Paniai KSPN Agats- Asmat dan sekitarnya di Kab. Asmat KPPN Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya 	 KSPN Sentani dan sekitarnya di Kab. Jayapura KPPN Jayapura dan sekitarnya di Kota Jayapura 	 KSPN Biak dan sekitarnya di Kab. Biak KPPN Numfor dan sekitarnya di Kab. Biak numfor KPPN Serui dan sekitarnya di Kab. Kep.Yapen KPPN Supiori dan sekitarnya di Kab. Supiori dan sekitarnya di Kab. Supiori



Gambar 6.7. Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua

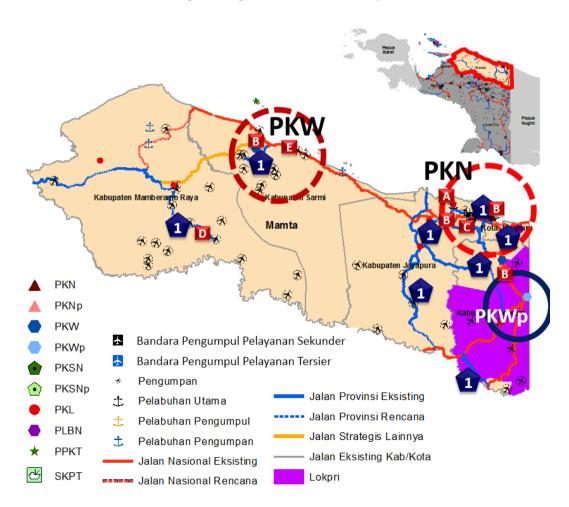
Dalam pengembangan klaster ekonomi terdapat interaksi di dalam klaster ekonomi, interaksi antar klaster ekonomi, interaksi di dalam wilayah adat, antar wilayah adat, maupun interaksi dengan wilayah luar Papua, berupa: (1) aliran barang dalam penciptaan nilai tambah yang ramah lingkungan (green added value); (2) aliran informasi & pengetahuan (sharing of knowledge) yang mendorong keterampilan dan inovasi; serta (3) aliran pemasaran. Interaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas lokal, serta dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya, tanpa mengabaikan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Dalam pemanfaatan klaster pariwisata, terdapat hubungan integrasi antara klaster pariwisata dengan klaster lainnya, yaitu sebagai lokasi promosi dan pemasaran output produksi klaster ekonomi.

Pada implementasi kebijakan umum pembangunan berkelanjutan "*Green Growth* berbasis wilayah adat", maka arah pengembangan juga difokuskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian limbah. Tantangan terbesar dari implementasi ini adalah diperlukan arahan yang tepat dari para pemangku kepentingan agar teknologi ramah dapat digunakan sebaik mungkin oleh setiap pelaku usaha pertanian dari hulu hingga hilir di dalam pengembangan klaster ekonomi.

6.2.2.5 Kebijakan Pengembangan Konektivitas

Pengembangan konektivitas Papua diarahkan untuk memadukan sistem pelayanan transportasi antarmoda, dalam menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga. Pada pengembangan klaster, infrastruktur menghubungkan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal dengan pusat pertumbuhan dan wilayah luar Papua, khususnya dalam pengembangan ekonomi OAP. Dengan adanya aksesibilitas yang memadai diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan.

a. Arah Pengembangan Konektvitas MAMTA



Gambar 6.8. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mamta

Jalan dan jembatan:

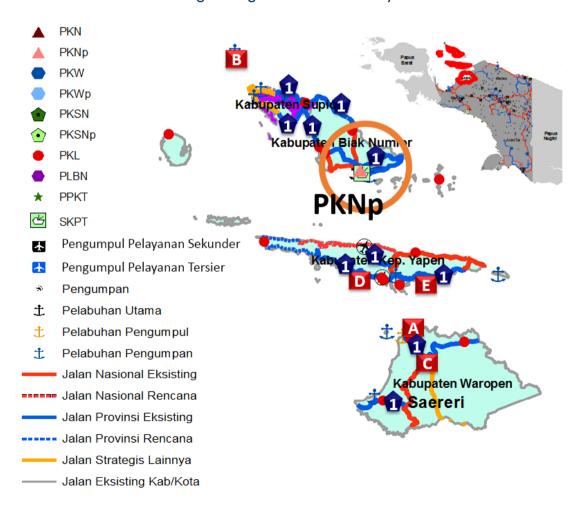
- 1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
- 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten

Perhubungan:

- A. Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre di Kab. Jayapura
- B. Pembangunan terminal type B di Kab./kota Jayapura, Sarmi, dan Keerom
- C. Pembangunan dermaga-dermaga di Danau Sentani
- D. Pembangunan Bandara Kustra di Kab.Mamberamo Raya
- E. Pembangunan Pelabuhan Wakde di Kab. Sarmi

b. Arah Pengembangan Konektivitas SAERERI

Gambar 6.9. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Saereri



Jalan dan jembatan:

- Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
- 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen
- B. Pembangunan Pelabuhan Miosbepondi di Kab. Supiori
- C. Pembangunan Bandara Botawa di Kabupaten Waropen
- D. Pembangunan dan peningkatan Bandara Kamanap di Kab. Kepulauan Yapen
- E. Pembangunan Pelabuhan Ampimoi di Kab. Kepulauan Yapen

c. Arah Pengembangan Infrastruktur MEE PAGO

Gambar 6.10.Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mee Pago PKN **PKNp PKW** Kabupaten Intan Jaya **PKWp PKSN** PKSNp PKL **PLBN** Kabupaten Dom **PPKT** 3 ✓ SKPT ♣ Pengumpul Pelayanan Sekunder Pengumpul Pelayanan Tersier Pengumpan # Pelabuhan Utama İ Pelabuhan Pengumpul Jalan Provinsi Eksisting # Pelabuhan Pengumpan ---- Jalan Provinsi Rencana Jalan Nasional Eksisting Jalan Strategis Lainnya Jalan Nasional Rencana Jalan Eksisting Kab/Kota

<u>Jalan dan jembatan</u>:

- Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
- 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kab. Nabire
- B. Pembangunan Bandara Wanggar di Kab.Nabire
- C. Pembangunan Terminal type B di Anibe
- D. Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-sipu di Kab. Mimika
- E. Rehabilitasi dan peningkatan Dermaga Samabusa di Kab. Nabire

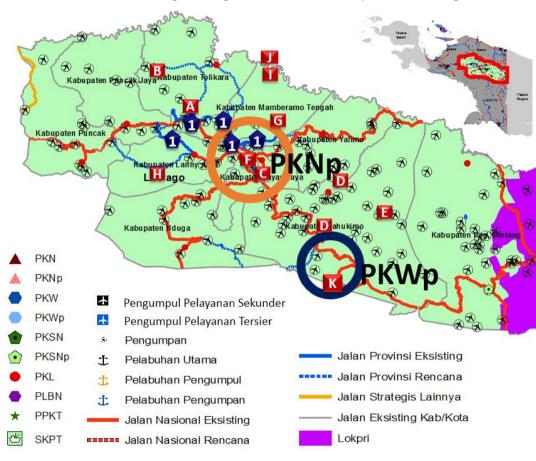
d. Arah Pengembangan Infrastruktur LA PAGO

Ialan dan jembatan:

- Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
- 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Bandara Mamit di Tolikara
- B. Pembangunan Bandara Fawi di Puncak Jaya
- C. Pembangunan Bandara Wamena
- D. Pembangunan Bandara Panggema & Ninia di Yahukimo
- E. Pembangunan Bandara Saminage di Yahukimo
- F. Pembangunan Terminal Tipe B di Jayawijaya
- G. Pembangunan Bandara Kobakma di Mamberamo Tengah
- H. Pambangunan Bandara Kuyawge di Lanny Jaya
- I. Pembangunan Bandara Taria Mamberamo Tengah
- J. Pembangunan Dermaga Sungai Taria di Mamberamo Tengah
- K. Pembangunan Bandara Nop Gollat di Yahukimo



Gambar 6.11.Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat La Pago

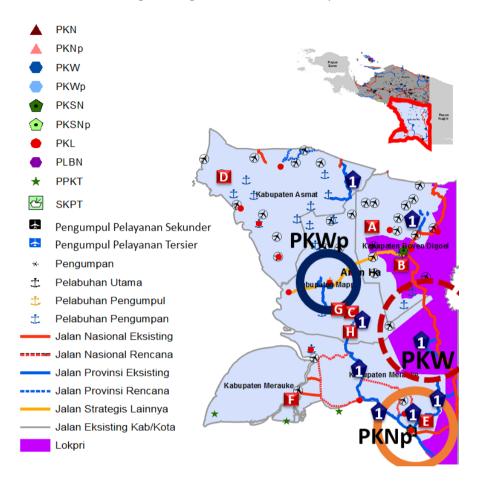
e. Arah Pengembangan Infrastruktur Anim Ha

Ialan dan jembatan:

- 1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
- 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Boeven Digul
- B. Pengembangan Pelabuhan Tanah Merah di Boeven Digul
- C. Pembangunan Bandara Kepi di Mappi
- D. Pembangunan Bandara Ewer di Asmat
- E. Pembangunan Terminal Tipe B di Merauke
- F. Pembangunan Pelabuhan Kimam di Merauke
- G. Pengembangan Pelabuhan Kepi
- H. Pembangunan Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi



Gambar 6.12. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Anim Ha

6.2.2.6 Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan

Pengembangan wilayah pinggiran menjadi prioritas daerah dalam pembangunan pelayanan dasar terutama untuk menjami bahwa pelayanan dasar, kesempatan ekonomi dan infrastruktur dasar sampai ke kampung-kampung yang ada di wilayah pinggiran.

Salah satu Kawasan pinggiran yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan adalah kawasan perbatasan. Pembangunan Kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Terdapat 2 (dua) pendekatan pembangunan dalam mengembangkan kawasan perbatasan di Papua, yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Pendekatan keamanan dilakukan melalui:

• Tranformasi kelembagaan lintas batas negara menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu, yaitu costum, immigration, quarantine, security (CIQS)

- Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, yang melibatkan peran aktif masyarakat
- Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan

Adapun pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) dilakukan melalui:

- Penguatan kegiatan ekonomi berbasis komoditas lokal di PLBN, PKSN, dan lokpri yg mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga, serta didukung pembangunan infrastruktur & pelayanan dasar
- Pembangunan SDM yg handal & pemanfaatan IPTEK
- Pembangunan konektivitas antara PKSN, lokpri, PKW, & PKN
- Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
- Peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara tetangga

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka peran provinsi Papua akan lebih banyak pada pendekatan kesejahteraan masyarakat. Karena menyangkut Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), maka penyelenggaraan kewenangan ini tentu saja dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga akan mendorong daerah kabupaten di perbatasan agar mendayaguanakan sumber daya ekonomi lokal dalam mendukung PKSN agar pembangunan PKSN memberikan kontribusi positif bagi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat kampung-kampung di sekitarnya.

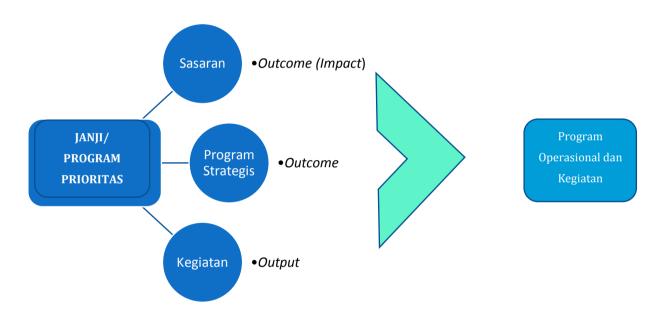
Tabel 6.7. Pengembangan Wilayah Perbatasan

			WILAYAH ADAT												
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI										
Pusat Kegiatan	KEDUDUKAN:														
Strategis	 menunjang sekto 	r strategis nasional													
Nasional (PKSN)	 menunjang penge 	unjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi													
(PKSIN)	daerah penyangg	erah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang telah ada													
	 berpotensi sebag 	perpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga													
	 pintu gerbang int 	ernasional yang menghul	bungkan dengan	negara tetangga											
	 simpul utama trai 	nsportasi yang menghubi	ungkan wilayah s	ekitarnya											
	Oksibil di Kab.	Tanah Merah di Kab.		Arso di Kab. Keerom											
	Pegunungan	Boven Digoel		• pusat											
	Bintang	pusat pelayanan		pertumbuhan											

			WILAYAH ADAT		
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
	 pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya 	kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; • pusat perdagangan skala internasional • pengembangan sekolah bertaraf internasional		wilayah sekitarnya • pengembangan sekolah bertaraf internasional	
PKSN Promosi	KEDUDUKAN:				
	Kawasan perkotaan	yang dipromosikan untu	k mendorong pe	ngembangan kawasan p	perbatasan negara
		Merauke di Kab. Merauke pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan pusat perdagangan skala internasional pengembangan sekolah bertaraf internasional		Jayapura • pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu • peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan • pusat perdagangan skala internasional	
Lokasi Prioritas (lokpri)	KEDUDUKAN: Kawasan yang me perbatasan	mpercepat pembanguna	n dan efektivita	as peningkatan kualita	s pelayanan publik di
perbatasan	Kab,Pegunungan Bintang (9 distrik) Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop	Kab. Merauke (5 distrik) Eligobel, Muting, Sota, Ulilin, Naukenjeri Kab. Boven Digoel (4 distrik) Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko		Kab. Keerom (5 distrik) Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe Kota Jayapura (2 distrik) Muara Tami, Jayapura Utara	Kab. Supiori (3 distrik) Supirori Barat, Supirori Utara, Kepulauan Aruri
Pulau-Pulau Terkecil Terluar (PPKT)	lingkungan hidup,Penempatan posPenempatan saraPeningkatan kese	s Nasional Tertentu (KSN , dan/atau situs warisan o pertahanan, pos keaman na bantu navigasi pelaya jahteraan masyarakat da enelitian, pertanian subsi	dunia an, dan/atau pos ran lam bentuk usah	i lain a kelautan dan perikana	
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	KEDUDUKAN:	nan pulau-pulau kecil dan	kawasan perbat	asan dengan basis sekto	
(SKPT)		SKPT Merauke	SKPT Timika	SKPT Sarmi	SKPT Biak Numfor
Pos Lintas Batas Negara (PLBN)		PLBN Sota di Kab. Merauke		PLBN Skouw di Kota Jayapura	

6.3. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Prioritas pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (outcome/impact), program (outcome) atau kegiatan (output) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi gambar berikut ini:



Gambar 6.13. Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah

Berdasarkan janji Gubernur Papua terpilih, prioritas pembangunan dan program Provinsi Papua terutama mencakup: 1) sumber daya manusia berdaya saing yang ditandai oleh sumber daya yang cerdas mandiri, sumber daya manusia yang sehat sejahtera, pemuda yang aktif dan berprestasi, dan berketahanan pangan; 2) menyukseskan penyelenggaraan PON XX 2020 di Provinsi Papua dengan prestasi yang baik, 3) pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, yang juga ditopang oleh 4) Kampung Papua berkembang dan mandiri dalam menjalankan kewenangannya; 5) permukiman masyarakat yang layak untuk mendukung kesejahteraan masyrakat; dan 6) percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menopang dan membangkitkan perkembangan wilayah,

pelayanan dasar dan ekonomi. Aspek pembangunan di atas didukung oleh: 1) tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntable dan kuat, 2) pengarusutamaan keadilan gender dan upaya perlindungan anakanak, 3) afirmasi melalui program perlindungan sosial, terutama bagi orang asli Papua, yang salah satunya telah diinisasi melalui Program BANGGA PAPUA dan 4) Kemitraan dengan berbagai sumber daya pembangunan yang ada di Provinsi Papua terutama dengan lembaga adat, lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mitra pembangunan internasional.

Tabel 6.8. menampilkan rincian prioritas program pembangunan daerah Papua Tahun 2018-2023 yang telah dipetakan berdasarkan sasaran strategis, strategi, urusan, kewenangan, kebijakan belanja (belanja langsung / belanja tidak langsung), serta tingkat prioritas di setiap wilayah adat. Dalam hal ini, tingkat prioritas terbagi menjadi 3, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3.

Tabel 6.8. Prioritas Program Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASA	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
Misi Pertama, Men	nantapk	an Kualitas dan Day	a Saing SDM											
Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	S1	Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	•		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan		1	1	1	1	1
			potensi unggulan	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	•		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk program Pendidikan Menengah Kejuruan		'			ľ	
			Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan	1	1	1	1	1
			Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta rumah guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama).	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan	2	2	1	1	1

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
			Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyebaran tenaga pendidikan dan guru kunjung, terutama di daerah terpencil	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan	2	2	1	1	1
			Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, profesionalisme dan tunjangan guru	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	•	•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belanja Bantuan Khusus Pendidkan dan beasiswa	2	2	2	2	2
			Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	•	•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Belanja Bantuan Khusus Pendidikan dan Beasiswa	2	2	1	1	1
			Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	•	•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan	1	1	1	1	1
	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menyempumakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan		1	1	1	1	1

				KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH	ADAT		
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEG	IS STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
		Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•	•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan					
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	•	•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
			Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan					
			Program Pengembangan Data/Informasi	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•	•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pengembangan Data/Informasi	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan					
		Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan				Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang	2	2	1	1	1

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
			puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	Resehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan					
			Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•	•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
			Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
			Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan	Program Peningkatan Pelayanan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian	2	2	1	1	1

					KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
		pemenuhan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua	Kesehatan Anak Balita					Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan					
		Generasi Emas Papua	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan					
		Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya, dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan			Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
		Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•	•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1

					KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATE	GIS STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
		Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•	•	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
		Pembangunan dan pengembangan rumah sakit rujukan di 5 wilayah adat.	Program Sumber Daya Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•	-	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan	1	1	1	1	1
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata						

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	DAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	SARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata						
			Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2
	S4	Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	•	•	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
			pengembangan industri olah raga Indonesia	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	•	•	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota			T		
			Menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung utama kegiatan PON	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		•	•	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	DAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
				Program Sumber Daya Kesehatan (pos kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis)	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	•	•	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan (pos kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis)	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota					
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika			Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
				Program Pelayanan Air Bersih	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral		•	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pelayanan Air Bersih	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota					
				Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	•		Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi						
			Menyiapkan promosi dan pengembangan ekonomi berbasis keunggulan komoditas masing- masing wilayah	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Urusan Pilihan Pariwisata	•	•	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan dapat berasal dari otsus	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi	1	1	1	1	1

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
	S5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	•	•	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
	S6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	•		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
Misi Kedua, Mema	ntapka	n Rasa Aman, Tentra	m dan Damai serta Kehidu _l	pan Demokrasi mem	perkuat Bingkai NKRI									
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial	S9	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	•		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		2	2	2	2	2
dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	S11	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	•		Program Pendidikan Politik Masyarakat		2	2	2	2	2

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
			diagregasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik	Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	•		Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah						
			Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	•	•	Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2
Misi Ketiga, Pengu	ıatan T	ata Kelola Pemerinta	han											
Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif,	S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan	Program perencanaan pembangunan daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan		•	Program perencanaan pembangunan daerah	Belanja Dana Otonomi Khusus 80% Bagian Kabupaten/ Kota (OTSUS)					
demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah			dan memberi insentif jasa lingkungan.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	•	•	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Belanja Dana Otonomi Khusus 80% Bagian Kabupaten/ Kota (OTSUS)	2	2	2	2	2
			Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		•	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota (Dana Infrastruktur)	2	2	2	2	2

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
	S13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan	Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi anggaran Kampung	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	•		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua		1	1	1	1	1
		pelayanan publik	Mengoptimalkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	•		Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah		2	2	2	2	2
			Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik,	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	•		Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan						
			regulasi, pengawasan dan penegakan aturan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	•		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		2	2	2	2	2
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	•		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						
			Memastikan seluruh penduduk Papua, terutama OAP terdata secara terpilah dan memiliki identitas kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	•	•	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
			Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan			Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		2	2	2	2	2
	S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	•		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		2	2	2	2	2
			Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur	Program Kerjasama Pembangunan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	•	•	Program Kerjasama Pembangunan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	1	1	3	3	3
			Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi	Program Kerjasama Pembangunan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan		•	Program Kerjasama Pembangunan	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota (Dana Infrastruktur)	2	2	2	2	2

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	DAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
			unggulan											
	S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	•		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota						
		kinerja daerah		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	•		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		2	2	2	2	2
				Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	•		Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur			2	2	2	2
				Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	•		Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan						

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAI	AN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
Misi Keempat, Per	guatan dan	n Percepatan Pere	konomian Daerah sesuai F	Potensi Unggulan Lo	kal dan Pengembanga	n Wilayah	berbasis k	Kultural dan Berkelanjutan						
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan	per pot	eningkatkan ndayagunaan tensi sumber ya alam untuk	Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Urusan Pilihan Pertanian			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		1	1	1	1	1
berkelanjutan	per eko	nciptaan rtumbuhan onomi yang rkualitas	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	•	•	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi	4	1	1	1	1
				Program Peningkatan Keamananan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	Urusan Pilihan Pertanian	•		Program Peningkatan Keamananan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi	1	'	'	'	'
			Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Pengembangan Agribisnis	Urusan Pilihan Pertanian	•	•	Program Pengembangan Agribisnis	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi	1	1	1	1	1
				Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Urusan Pilihan Pertanian	•	•	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi	1	1	1		1

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	SARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK Langsung	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebu nan	Urusan Pilihan Pertanian	•	•	Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi					
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Urusan Pilihan Pertanian	•	•	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi					
			Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	•	•	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1
	S17	Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	•		Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara		1	1	1	1	1
				Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	•		Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal		T		Т	T	Т

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
			Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	•		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		1	1	1	1	1
	S18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		2	2	2	2	2
			Revitalisasi pembangunan rendah karbon	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup			Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim						
			Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup			Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH		1	1	1	1	1
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		1	1	1	1	1
			Konservasi sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		2	2	2	2	2

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	DAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
				Lingkungan Hidup										
			Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	•		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		1	1	1	1	1
	S20	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai	Peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah (value added) komoditas	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		•	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1
		tambah yang optimal dan berkelanjutan	Peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Pilihan Perdagangan		•	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	'	'	•	•	•
			Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI)	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Urusan Pilihan Perdagangan	•		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		1	1	1	1	1
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Urusan Pilihan Perdagangan	•		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri				•		

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
			Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian, peternakan, dan perikanan dengan diberikan insentif dalam pengembangannya	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Pilihan Perdagangan	•	•	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1
			Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	•	•	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1
	S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada	Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	•	•	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	4	1			4
		pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan		Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	•	•	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1
			Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan		•	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
	S22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		1	1	1	1	1
	S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	•		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal		1	1	1	1	4
				Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	•		Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal		1	1	1	1	1
Mewujudkan Percepatan pembangunan sarana dan prasarana	S24	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung	Peningkatan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	•		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah dan		pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	•		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		1	1	2	2	2
pertumbuhan ekonomi daerah				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	•	•	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota					

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
				Perhubungan										
	S25	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Penataan guna lahan permukiman di perkotaan	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan			Program Perencanaan Tata Ruang		1	3	1	3	3
				Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan			Program pengendalian dan pemanfaatan ruang			3	ı	ა 	ა
			Pengendalian pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan			Program Perencanaan Tata Ruang		1	1	1	1	1
				Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan			Program pengendalian dan pemanfaatan ruang		•	•	'	•	•
	S26	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		•	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
		wilayah	Pengendalian banjir dan abrasi pantai	Program Pengendalian Banjir	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Program Pengendalian Banjir		2	2	2	2	2
	S27	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1

					KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	DAT	
TUJUAN / PRIORITAS SA DAERAH	ASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota					
		Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	Program Pelayanan Air Bersih	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		•		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	2	2	2	2	2
S28	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Ketersediaan energi (listrik/penerangan)	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	•	•	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota					
			Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	•	•	Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	2	2	1	1	1
\$29	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	•	•	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	2	2	1	1	1

VI.69

	SASARAN STRATEGIS		STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA			WILAY			
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH						PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
Meningkatkan pemerataan pembangunan	S30	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- pulau Kecil	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	•	•	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otsus yang ditempatkan pada pos bantuan keuangan pada kabupaten/kota tertenu sesuai dengan kondisi ketertinggalan di bidang infrastruktur Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otsus yang ditempatkan pada pos bantuan keuangan pada kabupaten/kota tertenu sesuai dengan kondisi ketertinggalan di	1	1	1	1	1
									bidang infrastruktur					
			Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	•	•	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1

	SASARAN STRATEGIS		STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN BELANJA			WILAY			AH ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH						PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
			Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan alokasi anggaran kampung	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	•	•	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	
	S31	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	•	•	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	2					
			Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	•	•	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota		2	4	1	4	
				Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	•	•	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota		2	ľ	•	•	
				Program Pendidikan Non Formal	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		•	Program Pendidikan Non Formal	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota						
				Program Pengembangan Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		•	Program Pengembangan Perumahan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	•	•	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	
			Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	•	•	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian	2	2	1	1	1	

	SASARAN STRATEGIS		STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA			WILAYAH ADAT			
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH						PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO	ANIM HA
									Kabupaten/ Kota					
	S32	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	•	•	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	1				
			perbatasan, daerah terluar dan tertentu.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan		•	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota		1	1	1	1
	\$33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	•	•	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	2	2	1	1	1
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	•	•	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	-				
				Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial			Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota					

						KEWEN	ANGAN	KEBIJAKAN B	ELANJA		WILA	YAH A	ADAT	
TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SAS	ARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
	S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	•	•	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	2	2	2	2	2
	S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	Mengurangi kesenjangan gender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	•	•	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota					
			gender dalam strategi pembangunan.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	•	•	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota	2	2	2	2	2
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	•	•	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota					

Tabel 6.9. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pi	rogram		i Kinerja RJMD			Сар	paian Kinerj	a Program	dan Kerang	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
M1	MISI PERTA	MA, MEMANTA	PKAN K	UALITA	S DAN I	DAYA S	AING SI	OM										
T1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	59,09	60,11	61,15		62,20		63,27		64,36		65,47		65,47		
	yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	48,83	50,54	52,30		54,13		56,02		57,97		60,00		60,00		
		Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkat an Status	n/a	n/a	Renda h		Renda h		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		
		Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	n/a	n/a	40		45		50		55		60		60		
		Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	n/a	37,09	39,53		42,13		44,90		47,85		51,00		51,00		
S1	Meningkatnya Aksesibiltas,	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,3	6,6	6,9		7,2		7,5		7,8		8,2		8,21		
	Mutu dan Tata Kelola	Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,5	10,8	11,0		11,2		11,5		11,7		12,0		12,00		
	Penyelenggaraa n Pendidikan	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	73,89	74,9	75,9		76,9		77,9		78,9		80,0		80,00		
		Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	40,00	42,8	45,8		49,0		52,4		56,1		60,0		60,00		
	Drogram	Angka Partisipasi	norcon	88,63	90,43	92,27		94,14		96,06		98,01		100,00		100,00		Urusan Wajib
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kasar (APK) PAUD	persen	00,03	90,43	92,21	1.500	94,14	1.650	90,00	1.815	90,01	1.997	100,00	2.196	100,00	9.158	Pelayanan Dasar Pendidikan
	Program Wajib Belajar	Angka Partisipasi Murni (APM)	persen	78,83	79,83	80,84	2.750	81,86	3.025	82,89	3.328	83,94	3.660	85,00	4.026	85,00	16.789	Urusan Wajib Pelayanan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сај	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20	023			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	SD/MI/Paket A/sederajat																Dasar Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/sederajat	persen	56,13	56,76	57,39		58,03		58,68		59,34		60,00		60,00		
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/sederajat	persen	0,56	0,49	0,43		0,37		0,33		0,29		0,25		0,25		
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/sederajat	persen	1,21	1,17	1,14		1,10		1,07		1,03		1,00		1,00		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	22,48	23,59	24,75		25,97		27,25		28,59		30,00		30,00		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	22,37	23,49	24,67		25,91		27,21		28,57		30,00		30,00		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	24,20	24,33	24,46		24,60		24,73		24,86		25,00		25,00		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	16,76	17,91	19,15		20,47		21,88		23,39		25,00		25,00		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	181,00	184,04	187,12		190,26		193,45		196,70		200,00		200,00		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan	murid per sekolah	196,09	196,73	197,38		198,03		198,69		199,34		200,00		200,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20)21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		menengah pertama																
		Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	92,00	94,00	96,00		98,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pake t C/sederajat	persen	33,88	34,83	35,81	57.970	36,81	60.000	37,85	75.000	38,91	75.000	40,00	75.000	40,00	342.97 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APTS SMA/SMK/MA/Pake t C/sederajat	persen	0,93	0,84	0,76		0,68		0,61		0,55		0,50		0,50		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	persen	33,87	34,82	35,80		36,81		37,84		38,90		39,99		40,00		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per guru	13,13	14,62	16,27		18,12		20,17		22,46		25,00		25,00		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	262,00	250,47	239,45		228,91		218,84		209,21		200,00		200,00		
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	73,98	74,95	75,93	1.500	76,93	4.150	77,94	4.465	78,96	3.812	80,00	4.193	80,00	18.119	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15- 59 tahun	persen	89,32	90,24	91,17		92,12		93,07		94,03		95,00		95,00		
		Jumlah PKBM aktif	unit	388,00	398,00	411,00		420,00		434,00		443,00		448,00		448,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode VID	Urusan Kewenangan
110	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	70,73	71,42	72,13	27.225	72,83	30.000	73,55	35.000	74,27	35.000	75,00	38.022	75,00	165.24 7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	60,00	62,95	66,04		69,28		72,68		76,25		80,00		80,00		
		Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	80,00	80,81	81,63		82,46		83,30		84,15		85,00		85,00		
		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	75,00	76,28	77,58		78,90		80,24		81,61		83,00		83,00		
		Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	75,00	76,43	77,89		79,37		80,89		82,43		84,00		84,00		
		Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	60,00	61,56	63,16		64,81		66,49		68,22		70,00		70,00		
		Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	45,00	46,67	48,40		50,20		52,06		54,00		56,00		56,00		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	-	2,50	5,00	99.934	7,00	110.00 0	10,00	120.00 0	15,00	123.00 0	20,00	130.00 0	20,00	582.93 4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	10,00	10,00	2,00		2,00		4,00		4,00		5,00		17,00		
		Jumlah kemitraan pendidikan yang	unit	15,00	18,68	23,27		28,98		36,10		44,96		56,00		56,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
110	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama																
		Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	persen	80,00	75,38	71,03		66,93		63,07		59,43		56,00		56,00		
	Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang Iulus tepat waktu	persen	85,00	86,59	88,21	5.000	89,86	5.000	91,54	10.000	93,26	10.000	95,00	15.000	95,00	45.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang Iulus tepat waktu	persen	60,00	61,56	63,16		64,81		66,49		68,22		70,00		70,00		
		Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang Iulus tepat waktu	persen	50,00	52,23	54,57		57,01		59,56		62,22		65,00		65,00		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	20,44	21,14	21,86		22,61		23,38		24,17		25,00		25,00		
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	-	-	250,00	15.000	250,00	19.000	250,00	35.000	250,00	35.000	250,00	35.000	1250,00	139.00 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	700,00	795,00	903,00		1025,0 0		1164,0 0		1322,0 0		1500,0 0		1500,00		
		Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit	-	-	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		50,00		
		Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	2,92	3,59	4,40		5,40		6,64		8,15		10,00		10,00		
		Rasio kecukupan rombel terhadap	rasio siswa	10,60	11,78	13,09		14,56		16,18		17,99		20,00		20,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
140	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		siswa SLB	SLB per rombel															
		APM pendidikan khusus	persen			10,00		10,52		11,07		11,64		12,25		12,25		
	Program Pendidikan Luar Biasa	Cakupan jenis pelayanan SLB terhadap penduduk penyandang disabilitas	jenis		2	2	1.424	2	5.000	3	5.500	3	6.000	3	7.000	3	24.924	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki SLB yang terakreditasi	kabupa ten/kot a		1	1		1		1		1		1		5		
		Persentase lulusan SLB yang terserap dalam lapangan pekerjaan	persen		50,00	52,00		55,00		57,00		60,00		65,00		65,00		
	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	30,00	32,67	35,57	105.71 6	38,73	112.00 0	42,17	150.00 0	45,92	153.58 0	50,00	150.00 0	50,00	671.29 6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	-	-	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	-	-	70,00	10.000	70,00	10.000	80,00	10.000	80,00	10.000	85,00	10.000	85,00	50.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
		Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		500,00		
											l						1	

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	paian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
140	Pembangunan					20	19	20)20	20)21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
S2	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	orang per hari	n/a	n/a	150		150		200		250		300		300		
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	-	10,00	20,00	300	30,00	500	40,00	500	50,00	500	60,00	500	60,00	2.300	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
		Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	-	-	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		
S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,14	65,86	66,59		67,33		68,07		68,83		69,59		69,59		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	7,63	9,59	12,04	300	15,13	1.000	19,01	4.000	23,88	4.000	30,00	4.000	30,00	13.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	5,84	6,45	7,13		7,88		8,70		9,61		10,62		10,62		
		Cakupan puskesmas pembantu	per 100.00 0 pendud uk	94,48	102,05	110,22		119,05		128,58		138,88		150,00		150,00		
		Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	-	-	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		
	Program Promosi	Rasio kelompok Upaya Kesehatan	persen	-	-	25,00	1.000	25,00	1.200	30,00	1.500	35,00	1.500	40,00	1.500	40,00	6.700	Urusan Wajib Pelayanan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
110	Pembangunan					20	19	20	20	20)21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Berbasis Masyarakat (UKBM)																Dasar Kesehatan
	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	-	27,59	34,92	3.070	44,20	3.871	55,95	4.146	70,83	4.348	89,66	4.898	89,66	20.333	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	-	60,00	60,00		65,00		65,00		70,00		75,00		75,00		
	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	-	-	70,00	70.998	75,00	75.000	80,00	100.00	90,00	110.00 0	100,00	125.00 0	100,00	480.99 8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	35,21	36,68	38,21	91.000	39,81	10.000	41,47	10.000	43,20	10.000	45,00	10.000	45,00	131.00 0	
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	3,45	6,90	13,79		20,69		27,59		34,48		41,38		41,38		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen		80	82	10.476	85	2.682	87	10.000	90	10.000	92	10.000	436	43.158	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Persentase PAK yang diawasi	persen			58	320	68	325	78	3.230	88	350	100	350	392		
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	-	-	10,00	500	10,00	1.000	15,00	1.000	20,00	1.000	25,00	1.000	25,00	4.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program	API Malaria	persen	59,00	51,35	44,69		38,89		33,85		29,46		25,64		25,64		Urusan Wajib

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarį	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						2.000		3.000		8.000		8.000		8.000		29.000	Pelayanan Dasar Kesehatan
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.00 0 pendud uk	62,78	56,30	50,48		45,27		40,59		36,40		32,64		32,64		
		Tingkat prevalensi DBD	persen	92,67	86,37	80,50		75,03		69,93		65,17		60,74		60,74		
		Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.00 0 pendud uk	42,00	39,83	37,78		35,83		33,98		32,23		30,57		30,57		
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 pendud uk	-	11,70	11,10		10,53		10,00		9,48		9,00		9,00		
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1.000 pendud uk	48,00	45,36	42,86		40,50		38,28		36,17		34,18		34,18		
		Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	-	-	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		
		Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen			65,00		75,00		85,00		95,00		100,00		100,00		
	Program Kemitraan Peningkatan	Cakupan pelayanan keehatan lembaga mitra di 5 wilayah	kabupa ten/kot a	-	6,00	7,00	5.534	9,00	9.810	12,00	10.791	14,00	11.870	16,00	13.057	16,00	51.063	Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Ca	paian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
110	Pembangunan					20)19	20)20	20	021	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Pelayanan Kesehatan	adat																Kesehatan
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	-	-	25,00		20,00		15,00		10,00		5,00		5,00		
		Unmet need pelayanan kesehatan	persen	2,63	2,93	3,26		3,63		4,04		4,49		5,00		5,00		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	7,00	6,38	5,81	500	5,29	500	4,82	500	4,39	500	4,00	500	4,00	2.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	289,00	259,08	232,25		208,21		186,65		167,32		150,00		150,00		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	40,90	43,60	46,47		49,54		52,81		56,29		60,00		60,00		
		Cakupan pelayanan nifas	persen	35,80	37,19	38,64		40,14		41,70		43,32		45,00		45,00		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	61,59	62,15	62,71	150	63,27	500	63,84	750	64,42	750	65,00	750	65,00	2.900	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	persen	11,30	10,02	8,89		7,88		6,99		6,20		5,50		5,50		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	32,80	31,35	29,96		28,64		27,37		26,16		25,00		25,00		
		Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	1,60	1,38	1,18		1,02		0,88		0,76		0,65		0,65		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Ca _l	paian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20	021	20)22	20	023			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen			20,00		20,00		25,00		25,00		40,00		40,00		
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 klh	8,00	7,13	6,35		5,66		5,04		4,49		4,00		4,00		
		Rasio posyandu yang aktif	persen	63,57	64,60	65,64		66,71		67,79		68,88		70,00		70,00		
		Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	48,89	49,40	49,91		50,42		50,94		51,47		52,00		52,00		
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi		46,00	46,95	47,92		48,91		49,92		50,95		52,00		52,00		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2115,0 9	2144,8	2175,0	3.000	2205,6 1	6.300	2236,6 3	8.000	2268,1 0	9.000	2300,0	10.000	2300,00	36.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	20,00	23,30	27,14		31,62		36,84		42,92		50,00		50,00		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	45,00	48,44	52,14		56,12		60,41		65,03		70,00		70,00		
	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	-	21,00	21,00	7.867	22,00	8.333	24,00	8.667	25,00	9.000	27,00	9.667	27,00	43.533	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Cakupan pembangunan dan	unit		5,00	5,00		5,00		6,00		6,00		8,00		8,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Ca _l	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20)21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat																
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 pendud uk	25,00	25,00	25,77		26,57		27,39		28,23		29,10		30,00		
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.00 0 pendud uk	1,12	1,41	1,78		2,24		2,83		3,57		4,50		4,50		
		Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.00 0 pendud uk	24,13	25,06	26,02		27,02		28,05		29,13		30,25		30,25		
		Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 pendud uk	1,03	1,05	1,08		1,11		1,14		1,17		1,20		1,20		
	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen		70,00	75,00	11.000	80,00	12.000	85,00	12.000	90,00	12.000	90,00	12.000	90,00	59.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen		85,00	85,00	1.140	90,00	1.403	90,00	1.570	95,00	1.670	95,00	1.850	95,00	7.633	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen			40,00	100	43,00	150	50,00	150	55,00	150	60,00	150	60,00	700	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Cakupan Jumlah kabupaten/kota	kabupa ten per	1,00	1,00	1,00		-		1,00		-		2,00		4,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	tahun															
		Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	56,25	56,86	57,47		58,09		58,72		59,36		60,00		60,00		
	Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat (RSJ)	Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan	persen			60,00	13.314	65	15.000	70	15.000	75	15.000	80	15.000	80	73.314	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	10,00	12,60	15,87	61.090	20,00	65.000	25,20	75.937	31,75	80.853	40,00	85.856	40,00	368.73 7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Jayapura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	-	60	60,00	19.118	65	20.000	70,00	20.000	75,00	20.000	80,00	20.000	80,00	99.118	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Cakupan rumah sakit kelas C	persen	-	44,83	48,28	-	48,28	-	51,72	-	55,17	-	58,62	-	58,62		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Jayapura)	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen		60,00	65,00	5.915	70,00	5.500	75,00	7.000	80,00	7.500	85,00	7.500	90,00	33.415	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Cakupan rumah sakit kelas C	persen	=	44,83	48,28		48,28		51,72		55,17		58,62		58,62		
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen		60,00	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		80,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Cap	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kii Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
140	Pembangunan					20	019	20	20	20	21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Sumber Daya Kesehatan	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	persen	60,00	62,25	65,00	7.867	67,50	8.333	70,00	8.667	72,50	9.000	73,00	9.667	73,00	43.533	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (RSUD Jayapura)	Cakupan advokasi pelayanan kesehatan jiwa pada masyarakat	persen			45,00	600	47,00	600	50,00	600	55,00	600	60,00	600	60,00	3.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSJ)	Cakupan kelompok terapi ODGJ yang terlayani	kelomp ok			50	9.075	75	10.000	100	12.000	125	15.000	150	15.000	150	61.075	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit Mata (RSUD Jayapura)	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Jayapura sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen		-	70	263.53 9	72	275.00 0	75	475.00 0	78	475.00 0	80	475.00 0	80	1.963.5 39	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen			60,00	62.650	60,00	62.000	65,00	70.000	65,00	70.000	70,00	70.000	70,00	334.65 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kinerj	a Program	dan Keran _i	gka Pendar	naan				eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan	Bull dud	6-1			20)19	20	20	20)21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	h Sakit Mata (RSUD Abepura)																	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit Mata (RSJ))	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSJ Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen			40,00	25.809	43,00	30.000	45,00	30.000	47,00	30.000	50,00	30.000	50,00	145.80 9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit Mata (RSUD Jayapura)	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Jayapura	persen			60	89.416	65	164.60	70	235.85	75	235.85	80	235.85	80	961.59	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Abepura	persen			65	26.218	70	50.647	75	72.571	80	72.571	85	72.571	85	294.58 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
110	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	(RSUD Abepura))																	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit Mata (RSJ)	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSJ Abepura	persen			50	539	55	1.899	60	9.071	65	9.071	70	9.071	70	29.652	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (RSUD Jayapura)	Bed Occupancy Ratio (BOR)	persen	41,84	42,35	42,87	46.000	43,39	50.000	43,92	50.000	44,46	50.000	45,00	50.000	45,00	246.00 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Lama hari pasien dirawat/ALOS (Averege Length of Stay)	hari		6	6		6		6		5		5		5		
		Angka perputaran tempat tidur /BTO (Bed Turn Over)	kali		60	60		60		55		55		50		50		
		Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati/TOI (Turn Over Interval)	hari		2	2		2		2		1		1		1		
		Persentase angka kematian kurang dari 48 jam/NDR (Net Death Rate)	persen			5		5		2,5		2,5		2,5		2,5		
	Program Pengembangan Lingkungan	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi	persen	33,06	34,12	35,22	505	36,36	2.530	37,54	2.783	38,75	3.062	40,00	3.368	40,00	12.248	Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keranş	gka Pendar	aan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan	Bull dad	6.1			20	19	20	20	20	21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Sehat	baik																Kesehatan
		Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	38,47	39,52	40,61		41,72		42,87		44,04		45,25		45,25		
	Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	persen			60	10.000	60	10.000	65	10.000	65	-	65	-	65	30.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Cakupan Puskemas yang memiliki Pos UKK (Usaha Kesehatan Kerja) yang aktif bagi pekerja informal	persen			10		15		20		25		25		25		
S4	Sukses pelaksanaan	Perolehan medali emas dalam PON	medali	17	-	-		90		-		-		-		90		
	PON dan prestasi olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30	30	40		80		85		95		100		100		
		Ketepatwaktuan pelaksanaan PON						tepat waktu										
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organis asi	-	40,00	40,00	6.913	40,00	7.000	50,00	8.000	50,00	10.000	50,00	10.000	50,00	41.913	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
		Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	-	-	80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		95,00		<u> </u>
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun	orang	-	-	20,00	18.465	20,00	19.000	30,00	1.000	30,00	1.000	40,00	1.000	40,00	40.465	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20)20	20)21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	internasional Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-	-	10,00	569.52 0	10,00	600.00	-		-		-		10,00	1.169.5 20	dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan
		Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-	-	-		6,00		-		-		-		6,00		dan Olah Raga
		Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	persen	-	75,00	100,00		-		-		-		-		100,00		
		Cakupan venue berstandar internasional	persen	30,00	60,00	90,00		100,00		-		-		-				
	Pengembangan Prasarana PON	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	50,00	50,00	100,00	110.84 1	100	100.00	-	-	-	-	-	-	100	210.84 1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Penyelenggaraa n Kompetisi/Peka n Olahraga/Kejuar aan OLahraga	Frekwensi penyelenggaraan even olahraga persiapan PON XX yang berjalan sukses	kali			5	154.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	154.00 0	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraa n PON XX/2020	Persentase hasil koordinasi penyelenggaran PON XX yang ditindaklanjuti	persen			100,00	25.000	100,00	30.000	-	-	-	-	-	-	100,00	38.269	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional	Jumlah venue PON XX yang berstandar internasional	gedung			2	475.00 0	10	200.00	-	-	-	-	-	-	12	675.00 0	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pembinaan Atlit Muda dan OLahraga Prestasi	Persentase atlit muda Pelatda (Pusat Pelatihan Daerah) yang berprestasi nasional	persen			100	37.000	100	37.000	100	30.000	100	30.000	100	35.000	100	169.00 0	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Persiapan Penyelenggaraa n PON XX 2020	Persentase persiapan PON XX	persen			85	136.74 1	100	250.00 0	-	-	-	-	-	-	100	386.74 1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani		-	-	75,00	4.396	80,00	4.500	85,00	4.500	90,00	4.500	95,00	4.500	95,00	22.396	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON	unit			50	2.053	50	2.333		3.000		3.000		3.333	50	13.719	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	_	Persentase peningkatan pengembangan	persen	-	-	1,25		1,50		1,75		2,00		2,25		2,25		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		UMKM keolahragaan																
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	-	-	-	2.000	150	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	150	12.000	Urusan Pilihan Pariwisata
	Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	-	-	250	7.867	250	8.333	-	8.667	-	9.000	-	9.667	250	43.533	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Sumber Daya Kesehatan (RSUD Jayapura)	Jumlah Pos dan Peralatan kesehatan yang memenuhi standar nasional untuk pelaksanaan PON	unit	-	-	40	1.000	40	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	40	5.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	-	-	-	4.000	3200,0 0	13.733		17.100		18.833		20.500		74.167	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
	Program Pelayanan Air Bersih	Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/ja m	-	-	-	250	432,00	250		250		250		250		1.250	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen				300	100,00	500		500		500		500		2.300	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
S 5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	68,08	69,19	70,3		71,5		72,6		73,8		75,0		75,00		
	pembangunan daerah	Persentase pemuda Asli Papua yang	persen	15,60	16,6	17,7		18,8		20,1		21,4		22,8		22,76		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Cap	oaian Kinerj	ja Program	dan Keran	gka Pendar	aan			Kondisi Kin Akhir Pi RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		menjadi wirausahawan																
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	-	-	250,00	2.037	250,00	2.100	250,00	2.200	250,00	2.300	250,00	2.500	1250,00	11.137	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah organisasi kepemudaan	organis asi	47,00	49,00	51,00		53,00		55,00		57,00		59,00		60,00		5
		Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	-	20,00	25,00		25,00		30,00		35,00		50,00		50,00		
	Program	Cakupan pengusaha	persen	_	20	25		25		30		35		50		50		Urusan Wajib
	peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	perseri	-	20	25	425	25	1.200	30	1.200	33	1.200	30	1.200	30	5.225	Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	7386,0 0	7769,0 0	8171,0 0	2.053	8594,0 0	2.333	9039,0	3.000	9507,0 0	3.000	10000,	3.333	10000,00	13.719	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam	Persentase pengarusutamaan pemuda dalam perencanaan pembangunan	persen			25,00	1.500	30,00	1.500	35,00	2.000	40,00	2.500	45,00	3.000	45,00	10.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	paian Kiner	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	berbagai bidang pembangunan																	dan Olah Raga
\$6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kabupa ten/kot a	13	13	11		10		9		7		7		7		
		Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	26,95	27,44	27,93		28,43		28,95		29,47		30,00		30		
		Persentase penduduk tahan pangan	persen	40,04	42,83	45,82		49,01		52,43		56,09		60,00		60		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	15,00	15,00	5.500	15,00	6.667	20,00	7.333	20,00	8.333	25,00	9.000	25,00	36.833	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	60,00	56,08	52,41		48,99		45,79		42,80		40,00		40,00		
		Skor PPH	skor	87,60	88,43	89,26		90,10		90,95		91,81		92,67		92,67		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata- rata kab/kot a	280,00	258,90	239,40	529	221,36	2.500	204,68	5.000	189,26	5.000	175,00	5.000	175,00	18.029	Urusan Pilihan Perdagangan
																_		
S7	Terwujudnya internalisasi nilai adat dan	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3	3	1		1		1		1		1		5		
	budaya asli Tanah Papua	Cakupan Cagar budaya yang	jumlah	0	0	0		0		1		0		1		2		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	paian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20	21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	dalam berbagai	ditetapkan																
	bidang kehidupan masyarakat	Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	n/a	n/a	2		2		2,5		2,5		5		5		
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikul um	-	-	1,00	2.200	1,00	3.500	1,00	4.500	1,00	3.000	1,00	3.500	5,00	16.700	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	-	-	1,00	1.000	1,00	1.100	1,00	1.200	2,00	1.200	2,00	1.200	7,00	5.700	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
		Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3,00	3,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
		Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali		5,00	5,00		5,00		7,00		7,00		7,00		31,00		
		Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		0,00		1,00		2,00		
		Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen		40,00	40,00		45,00		45,00		50,00		50,00		50,00		
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	-	-	5,00	1.000	5,00	1.000	5,00	1.500	5,00	2.000	5,00	2.500	25,00	8.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
	Program	Cakupan partisipasi	kali	-	-	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		Urusan Wajib

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram	Kondisi Awal	Kinerja RJMD			Сар	paian Kiner	ia Program	dan Keran	gka Pendan	aan			Kondisi Kin Akhir P RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan	Bull days	6.1			20	19	20	20	20	21	20	22	20)23		1	
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Pengelolaan Keragaman Budaya	Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional					3.000		3.500		4.000		3.500		4.000		18.000	Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
M2	MISI KEDUA	A, MEMANTAPKA	AN RASA	A AMA	I, TENT	RAM D	AN DAN	/AI SER	TA KEH	IDUPAI	N DEMO	OKRASI	MEMPE	RKUAT	BINGK	AI NKRI		
Т2	Tujuan 2 Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	per 100.00 0 pendu duk	236,00	218,00	202,00		187,00		173,00		159,00		147,00		147,00		
	yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	61,02	61,36	61,70		62,04		62,39		62,73		63,08		63,08		
\$8	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	Rasio kriminalitas yang ditangani	persen	63,62	64,64	65,68		66,73		67,81		68,89		70,00		70,00		
	Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah konflik horisontal	kasus		10,00	10,00	1.000	6,00	1.100	6,00	1.200	2,00	1.200	2,00	1.200	2,00	5.700	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20)21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
																		Masyarakat
		Cakupan penegakan Perda	persen		80,00	80,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8,70	9,99	11,48		13,19		15,15		17,41		20,00		20,00		
		Angka korban kejahatan pembuhunan per 100.000 penduduk	kasus	3,02	2,59	2,22		1,90		1,63		1,40		1,20		1,20		
	Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah konflik horisontal	kasus		10,00	10,00	700	6,00	700	6,00	700	2,00	700	2,00	700	2,00	3.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Cakupan penegakan Perda	persen		80,00	80,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8,70	9,99	11,48		13,19		15,15		17,41		20,00		20,00		
		Angka korban kejahatan pembuhunan per 100.000 penduduk	kasus	3,02	2,59	2,22		1,90		1,63		1,40		1,20		1,20		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	-	40,00	45,00	709	50,00	800	55,00	900	60,00	900	65,00	900	65,00	4.209	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Rasio jumlah linmas per 10.000	rasio	63,45	65,67	67,97		70,35		72,81		75,36		78,00		78,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	ia Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kin Akhir P RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		penduduk																
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	-	65,00	70,00	1.000	75,00	1.000	80,00	1.000	85,00	1.000	85,00	1.000	85,00	5.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen		28,00	32,00	1.500	36,00	1.500	40,00	1.500	45,00	1.500	50,00	1.500	50,00	7.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen		40,00	45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		65,00		Wasyarakat
S9	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	75,97	76,42	76,86		77,31		77,77		78,22		78,68		78,68		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali			2,00	1.000	2,00	1.100	2,00	1.150	2,00	1.200	2,00	1.250	10,00	5.700	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Cakupan peserta	orang			250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		1250,00		-

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan Cakupan fasilitasi Forkompimda	kali			5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		25,00		
S10	Meningkatnya penegakan HAM	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM) Rata-rata Nilai Skor	Jumlah nilai	0	0	3 50		60		3 65		70		3 75		15 75		
		Peduli HAM																
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	-	-	2,00	1.000	2,00	1.000	2,25	1.000	2,50	1.000	3,00	1.000	3,00	5.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen		20,00	20,00		30,00		30,00		40,00		50,00		50,00		
S11	Meningkatnya Kebebasan Sipil,	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	92,15	92,62	93,09		93,56		94,04		94,52		95,00		95		
	Hak-Hak Politik dan Lembaga	Nilai skor aspek hak- hak politik	skor	41,13	42,49	43,90		45,35		46,85		48,40		50,00		50		
	Demokrasi	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	53,45	54,49	55,55		56,63		57,73		58,86		60,00		60,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen			2,50	1.806	2,50	2.000	5,00	2.000	5,00	2.000	10,00	2.000	10,00	9.806	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
		Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen			70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		Masyarakat
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-	-	75,00		-		-		-		-		75,00		
	Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	-	-	80,00	500	80,00	500	85,00	500	85,00	500	90,00	500	90,00	2.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	-	-	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		,
	Program Pemberdayaan Keagamaan	Cakupan kelompok keagamaan yang berfungsi dan aktif	jumlah	-	140	140	3.768	140	5.000	160	6.000	160	7.000	180	8.000	180	29.768	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
		Rasio rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dan	persen		40	40		45		45		50		50		50		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		pemberdayaan																
	Program Pembinaan Mental Spritual	Frekuensi koordinasi lembaga keagamaan dengan pemerintah pertahun	kali	-	-	5	500	5	500	5	500	5	500	5	500	25	2.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
	Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk	per 10.000 pendud uk	26,63	27,16	27,71	700	28,26	750	28,83	750	29,41	750	30,00	750	30,00	3.700	Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
M3	MISI KETIGA	L A, PENGUATAN 1	TATA KE	LOLA P	EMERII	IAHAT	N											
										1		1		1				
Т3	Tujuan 3 Meningkatkan	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C-	C-	C-		С		С		B-		В		В		
	Tata Kelola Kepemerintaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	С	С	С		СС		СС		В		В		В		
	n yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraa n pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	С	С	С		В		В		В		A		A		
S12	Meningkatnya	Tingket earsies	norcor	85	88	90		93		95		98		100		100		
312	ivieilligkatilya	Tingkat capaian	persen	63	00	90		33		33		30		100		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran _i	gka Pendar	aan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	kinerja Penyelenggaraa n Otonomi	realisasi program- program Otsus yang direncanakan																
	Khusus Papua	Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah kabupa ten/kot a	0	0	5		5		6		6		7		29		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian realisasi program- program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90	13.879		15.000		15.000		15.000		15.000	100	73.879	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen			90	2.200	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	12.200	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
		Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokum en		1	2		-		-		-		-		2		
		Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen		85	85		90		95		100		100		100		
S13	Meningkatnya kapasitas dan	Presentase OPD dengan nilai SAKIP B	predika t	В	В	В		В		ВВ		BB		BB		ВВ		
	akuntabilitas dalam penyelenggaraa	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	4,88	5,08	5,29		5,50		5,72		5,96		6,20		6,20		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran _i	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarş	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	n pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	74,37	76,04	77,76		79,51		81,30		83,13		85,00		85,00		
		Capaian Implementasi e- government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	persen	80	80	85		85		90		90		95		95		
		Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	0	0	1		1		1		1		1		5		
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	Jumlah Perdasi tentang pemerintahan yang ditetapkan	jumlah			5	1.000	5	1.000	5	1.000	5	1.000	5	1.000	25	5.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	-	-	60	1.000	65	1.000	70	1.000	75	1.000	80	1.000	80	5.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	1	-	20	1.500	30	1.500	40	1.500	50	1.500	60	1.500	60	7.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
	Program Peningkatan	Jumlah aparatur kampung dan distrik	orang	-	-	250	-	250	1.000	250	10.000	250	10.000	250	5.000	1250	26.000	Urusan Pemerintahan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kii Akhir P RPJ Tar	Periode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20	21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	yang mendapatkan pelatihan pemerintahan kampung																Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
		Cakupan kampung mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya	persen	-	40	45		50		55		60		65		65		
	Program Peningkatan Penyelenggaraa n Otonomi Daerah	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kot a	7		12	1.000	14	1.000	16	1.000	18	1.000	20	1.000	20	5.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Peningkatan Penyelenggaraa n Otonomi Daerah	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kot a	7		12	-	14	1.000	16	1.000	18	1.000	20	1.000	20	4.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Perencanaan
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	pesen	100	100	100	500.00	100	500.00	100	585.82 0	100	615.23 9	100	619.55 2	100	2.700.0	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
		Cakupan pelayanan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	pesen	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Penataan Peraturan Perundangunda	Jumlah Perdasi/Perdasus yang ditetapkan	dokum en			5	450	5	1.000	5	1.500	5	1.500	5	1.500	25	5.950	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Ca _l	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	ngan																	Administrasi Pemerintahan
	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Cakupan kasus hukum warga miskin yang memperoleh pendampingan	kasus			10	450	10	1.000	10	1.200	10	1.300	10	1.500	50	5.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua yang difasilitasi	jumlah			100	270	100	300	100	300	100	300	100	300	100	1.470	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Cakupan produk hukum daerah yang didesiminasi	persen			70	30	75	100	80	100	85	100	90	100	90	430	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	persen			100	750	100	1.000	100	1.300	100	1.500	100	1.500	100	6.050	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
		Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	persen			50		70		90		100		100		100		
		Cakupan OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	persen			80		85		90		95		100		100		
		Persentase	persen			25		40		55		70		85		85		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti																
	Program Peningkatan Kinerja BUMD	Cakupan jumlah BUMD dengan kinerja baik	persen			50	1.000	55	2.000	60	2.000	65	2.000	70	2.000	70	9.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan Pemprov Papua	persen			100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	1.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan barang dan jasa	Cakupan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	persen			80	15.600	90	17.000	100	20.000	100	22.000	100	25.000	100	99.600	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase penetapan perdasi dan perdasus berdasarkan prolegda	jumlah			5	340.70 1	5	340.70 1	5	340.70 1	5	340.70 1	5	340.70 1	25	1.703.5 05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
		Pembahasan APBD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	tepat/ti dak	Tepat	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		
	Program fasilitasi penghubung daerah	Cakupan aparatur Badan Penghubung yang meningkat kemampuannya di promosi potensi daerah	persen			25	500	30	2.000	35	2.500	40	2.500	45	2.500	45	10.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	ia Program	dan Keranş	gka Pendan	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Persentase peningkatan jumlah pengunjung event seni budaya di anjungan Papua TMII	persen			2,5		2,75		3		3,25		3,5		3,5		
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Jumlah perdasi dan perdasus yang mendapatkan rekomendasi oleh MRP	peratur an			10	166.50 0	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	366.50 0	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen			20	15.600	25	17.000	30	20.000	35	22.000	40	25.000	40	99.600	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Pendidikan Kedinasan	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	-	3	3	16.178	3	17.000	5	17.000	5	17.000	8	17.000	8	84.178	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen			80		82		85		87		90		90		
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen			70		75		80		85		90		90		
		Persentase ASN	persen			65		70		75		80		85		85		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pi	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan																
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Cakupan penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu	persen			60	2.000	65	2.000	70	2.000	75	2.000	80	2.000	80	10.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Jumlah bantuan hukum	persen		80	80	250	85	600	85	700	90	1.000	95	1.000	95	3.550	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang			100,00	13.299	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	500,00	73.299	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	-	85,00	85,00	300	85,00	300	90,00	300	90,00	300	95,00	300	95,00	1.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepustakaan	persen	-	-	1,20	1.000	2,00	1.000	2,25	1.000	3,00	1.000	4,00	1.000	4,00	5.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tid ak	Ada	Ada	Ada	3.600	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	21.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
																		Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	64,25	67,42	70,75		74,24		77,90		81,75		85,78		85,78		
		Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	29,70	31,91	34,28		36,83		39,57		42,51		45,67		45,67		
		Persentasekepemilik an akta kelahiran	persen	44,06	45,77	47,54		49,38		51,29		53,28		55,34		55,34		
		Persentase pasangan berakte nikah	persen		40,00	45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		65,00		
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandir	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelomp ok per tahun			100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	500	6.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	persen		3,26	3	1.000	3	1.000	2,8	1.000	2,5	1.000	2,25	1.000	2,25	5.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen		60	60		65		70		75		80		80		
	Program penyiapan tenaga pendamping	Cakupan kampung KB	persen			20	1.000	25	1.000	30	1.000	35	1.000	40	1.000	40	5.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kii Akhir P RPJ Tar	Periode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	kelompok bina keluarga																	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun			30		30		30		30		30		150		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua	per tahun			5	4.000	5	13.733	8	17.100	8	18.833	10	20.500	10	74.167	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasa ma			2	3.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	10	23.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasa ma			2	800	2	800	2	800	2	800	2	800	10	4.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen			10	10.000	10	26.000	20	29.000	20	35.000	40	40.000	40	140.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen			20		25		30		35		40		40		
	Program Mengintensifka	Cakupan pengaduan dan gugatan	persen			15	1.208	20	1.300	25	1.400	30	1.500	35	1.500	35	6.908	Urusan Pemerintahan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Kerang	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan Daerah	Dockwinsi	Satuan			20	19	20)20	20	21	20	22	20	23		1	
	Daeran	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	n Penanganan Pengaduan Masyarakat	masyarakat yang ditindaklanjuti																Fungsi Penunjang Pengawasan
	Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun			5	3.600	5	3.700	8	4.000	8	4.000	10	4.000	10	19.300	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis			1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	5	5.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen			40	600	45	866	50	750	55	750	60	750	60	3.716	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
S14	Meningkatnya kualitas perencanaan,	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	46,39	80,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
	penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	persen	-	75,38	30,00		40,00		50,00		70,00		85,00		85,00		
	pembangunan daerah	Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	persen	48,24	36,70	39,04		41,53		44,18		47,00		50,00		50,00		
		Cakupan ketersediaan data statistik bagi	persen	-	50,00	53,48		57,20		61,19		65,44		70,00		70,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	ja Program	dan Keran _i	gka Pendan	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarş	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah																
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	46,39	80,00	80,00	13879	85,00	15000	90,00	15000	95,00	15000	100,00	15000	100,00	73879	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	70	75	85		90		90		95		100,00		100,00		
		Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	86,21	89,66	93,10		96,55		100,00		100,00		100,00		100		
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/ti dak tepat	Ya	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		
		Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/ti dak tepat	Ya	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		
		Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100	100		100		100		100		100		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Ca _l	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen		85	90		95		100		100		100		100		
	Program Pengembangan data/informasi	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen			80	3298	85	5000	90	5000	95	5000	100	5000	100	23298	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Pengembangan data/informasi	Cakupan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	persen			80	150	85	150	90	150	95	150	100	150	100	750	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	80	80	85	1650	85	2000	90	2000	90	2000	90	2000	90	9650	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	-	-	25,00		35,36		50,00		70,71		100,00		100,0		
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	-	-	25,00	1720	35,36	1760	50,00	1760	70,71	1760	100,00	1760	100,0	8760	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	-	-	25,00	1250	35,36	1300	50,00	1400	70,71	1500	100,00	1600	100,0	7050	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen		70	75,00	430	80,00	440	85,00	440	90,00	440	95,00	440	95,0	2190	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Statistik
		Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokum en		5	5		5		5		5		5		25		
S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaba n Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	dalam pengelolaan	Ketepatan waktu	Katego	tepat	tepat	tepat		tepat		tepat		tepat waktu		tepat		tepat		
	keuangan dan kinerja daerah	Penetapan APBD Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	ri persen	waktu 7,81	waktu 8,61	waktu 9,49		waktu 10,46		waktu 11,52		12,70		14,00		waktu 14,00		
	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah			4	250	4	300	4	300	4	300	4	300	20	1.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen		80	85	2.200	85	2.500	95	2.500	100	2.500	100	2.500	100	12.200	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
		Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaba	persen			100		100		100		100		100		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kinerj	a Program	dan Keran _i	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20	023			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		n APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua																
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tida k	Ya	Ya	Ya	23.679	Ya	25.000	Ya	25.000	Ya	25.000	Ya	25.000	Ya	123.67 9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
		Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	-	-	100		100		100		100		100		100		
		Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	-	20	20		20		40		40		50		50		
		Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tida k	Ya	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		
		Tertib Administrasi BMD	ya/tida k	Ya	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pendapatan Daerah)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	1,26	1,56	1,94	5.190	2,41	6.000	2,99	6.000	3,71	6.000	4,60	6.000	4,60	29.190	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
	,	Kontribusi PAD terhadap total	persen	7,81	8,61	9,49		10,46		11,52		12,70		14,00		14		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		pendapatan daerah																
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	1,96	2,10	2,26	1.336	2,42	1.400	2,60	1.400	2,79	1.400	3,00	1.400	3,00	6.936	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
	Kebijakan KDH Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	-	-	2	4.958	2	5.500	2	6.000	3	6.000	3	6.000	12	28.458	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	14	16	18		20		22		26		28		28		
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memilki sertifikat kompetensi	orang per tahun	-	-	1	1.896	1	2.000	2	2.300	2	2.500	4	2.500	10	11.196	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaaan yang ditindaklanjuti	persen	-	80	85	4.396	85	4.500	95	4.500	100	4.500	100	4.500	100	22.396	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemerikasaan	persen		40	40	4.934	40	5.000	45	5.200	45	5.300	50	5.500	50	25.934	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Ca _l	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kin Akhir P RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20)21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	dan Pembangunan																	
		Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen		20	25		25		30		35		35		35		
		Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen		30	30		40		40		50		60		60		
M4		AT, PENGUATAI ERBASIS KULTUF					NOMIAI	N DAER	AH SES	UAI PO	TENSI U	INGGUI	AN LOP	(AL DAI	N PENG	EMBANG	iAN	
T4	Tujuan 4: Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Ekonomi DT	persen	4,64	4,96	5,24				5,91		6,26		6,62		6,62		
	ekonomi yang inklusif,	Laju Pertumbuhan Ekonomi TT	persen	5,18	5,52	5,83		6,20		6,53		6,95		7,39		7,39		
	berkeadilan dan berkelanjutan	Rasio Gini	nilai indeks	0,4000	0,40	0,39		0,39		0,39		0,39		0,38		0,3840		
		Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0,392	0,371	0,351		0,332		0,315		0,298		0,282		0,282		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	81,47	82,06	82,64		83,21		83,83		84,44		85,03		85,03		
		Persentase penerapan green economy	persen			50		55		60		65		70		70		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,62	2,91	2,70		2,50		2,32		2,16		2,00		2,00		
		PDRB Perkapita DT	juta rupiah	58,68	59,13	59,58		59,86		60,13		60,58		60,94		60,94		
		PDRB Perkapita TT	juta rupiah	37,52	39,82	42,19		44,77		47,50		50,50		53,43		53,43		
		Tingkat Inflasi				2,36		2,36										

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ia Program	dan Keranş	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
110	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
S16	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,6	88,00	88,39		88,79		89,19		89,60		90,00		90		
	daya alam untuk penciptaan pertumbuhan	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	-	45		50		55		60		65		70		
	ekonomi yang berkualitas	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	2,27	2,59	2,95		3,37		3,84		4,38		5,00		5,0		
		Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	0,80	1,09	1,47		2,00		2,71		3,68		5,00		5,0		
		Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	0,82	1,11	1,50		2,02		2,74		3,70		5,00		5,00		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Tanaman Pangan)	Cakupan bina kelompok tani	persen	_	-	20	671	20	230	20	750	20	800	20	800	100	3.251	Urusan Pilihan Pertanian
	1 411841117	NTP peternakan	persen	99,89	99,91	99,93		99,94		99,96		99,98		100,00		100		
		NTP tanaman pangan	persen	86,31	88,45	90,65		92,90		95,21		97,58		100,00		100		
	Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	unit			10	300	10	500	10	500	10	500	10	500	50	2.300	Urusan Pilihan Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Perkebunan)	Cakupan bina kelompok tani	persen	-	-	20	560	20	1.000	20	1.100	20	1.300	20	1.500	100	5.460	Urusan Pilihan Pertanian
		NTP perkebunan	persen	99,89	99,91	99,93		99,94		99,96		99,98		100,00		100		
		NTP tanaman pangan	persen	86,31	88,45	90,65		92,90		95,21		97,58		100,00		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	7,37	8	8,16	5.500	8,58	6.667	9,03	7.333	9,50	8.333	10,00	9.000	10	36.833	Urusan Pilihan Pertanian
		Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	-	-	-		60		-		-		-				
		Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	2,67	2,86	3,06		3,27		3,50		3,74		4,00		4,00		
		Cakupan pengembangan agroindustri terpadu hortikultura	persen	-	10	15		20		25		30		35		35		
		Tingkat swasembada pangan	persen	-	-	25		30		35		40		45		45		
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perke bunan Lapangan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai komptenesi memadai	persen	-	60	65	10.000	70	10.500	75	11.000	80	12	85	12.000	85	43.512	Urusan Pilihan Pertanian
	Program Pengembangan Agribisnis	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	persen			30	10.000	35	10.000	40	11.000	45	11.000	50	12.000	50	54.000	Urusan Pilihan Pertanian
	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	persen			2,0	10.000	2,0	11.000	2,5	12.000	2,5	13.000	3,0	14.000	3,0	60.000	Urusan Pilihan Pertanian
	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasa n			2	500	2	11.000	2	12.000	2	13.000	2	15.000	10	51.500	Urusan Pilihan Pertanian
	Program Peningkatan	Cakupan teknologi pertanian/perkebun	jenis	ı	-	10	500	10	500	12	500	12	500	15	500	15	2.500	Urusan Pilihan Pertanian

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	paian Kinerj	ia Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kin Akhir P RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Penerapan Teknologi Pertanian/Perke bunan	an rakyat tepat guna yang diterapkan																
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/perke bunan	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	485,22	489,26	493,34	4.697	497,46	5.000	501,60	6.000	505,78	6.100	510,00	6.200	510	27.997	Urusan Pilihan Pertanian
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar			1000	4.600	2000	5.000	3000	10.000	4000	10.000	5000	10.000	39600	39.600	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	,	Persentas luas lahan yang terlayanii irigasi	persen			75		80		85		90		95		95		
		Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	44,55	46,82	49,20		51,70		54,33		57,10		60,00		60		
		Cakupan layanan air bersih/air minum	persen		48	50		52		54		56		60		60		
		Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/ lokasi			20		20		20		20		20		100		
		Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m			40		50		60		70		80		80		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perke	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen			25	4.000	30	4.000	35	4.000	40	4.000	45	4.000	45	20.000	Urusan Pilihan Pertanian

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kin Akhir Pe RPJN Targ	eriode //D	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	bunan																	
		Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	-	-	2		2		2		2		2		10		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen			50	1.000	55	2.400	60	2.500	65	2.500	70	2.500	70	10.900	Urusan Pilihan Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	Ton	30.146. 247	31.277. 043	32.450. 255	12.073	33.667. 475	13.536	34.930. 354	13.200	36.240. 603	13.500	37.600. 000	13.700	37.600.00	66.009	Urusan Pilihan Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen		30	32	-	34	1.000	36	1.000	38	1.000	40	1.000	40	4.000	Urusan Pilihan Pertanian
	Program Peningkatan Kemananan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen		10	10	200	10	750	15	1.000	15	1.000	25	1.000	25	3.950	Urusan Pilihan Pertanian
S17	Mengoptimalka n peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. juta	13,21	14,69	16,34		18,17		20,21		22,48		25,00		25,00		
	Program pembinaan dan pengawasan	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang	persen			80	1.000	85	1.000	90	1.000	95	1.000	100	1.000	100	5.000	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
140	Pembangunan					20	19	20)20	20	021	20)22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	bidang pertambangan	ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan																Mineral
		Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen			40		45		50		55		60		60		
		Persentase penambangan illegal yang ditertibkan	persen			80		85		90		95		100		100		
		Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen			25		50		75		100		100		100		
		Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen			30		40		50		60		70		70		
	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen			65	900	80	950	90	950	100	950	100	950	100	4.700	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen			40	839	50	600	60	500	70	500	80	500	80	2.939	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
	Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter		10.000	10.000	750	9.800	750	9.800	750	9.500	750	9.500	750	9.500	3.750	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran _i	gka Pendar	naan			Kondisi Kin Akhir Po RPJN Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	bakar gas (BBG)																	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen			80	500	85	550	90	2.000	95	2.000	100	2.000	100	7.050	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali			2		2		2		2		2		10		
	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	persen			80	-	85	500	90	500	95	500	100	500	100	2.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perke bunan	Persentase hasil produk tanaman pangan lokal berkualitas yang terserap	persen	-	-	5	2.950	5	3.100	10	3.100	10	3.100	15	3.100	15	15.350	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Cakupan kelompok binaan tani lokal pemasok kebutuhan makanan sektor pertambangan yang berkembang	kelomp ok			20		20		20		20		20		100		
S18	Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas Udara	indeks	90,91	91,58	92,25		92,93		93,62		94,31		95,00		95		
	lingkungan	Indeks Kualitas Air	indeks	77,33	77,77	78,21		78,65		79,10		79,55		80,00		80		
	hidup dan aksi mitigasi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	78,18	79,28	80,39		81,52		82,66		83,82		85,00		85		
	perubahan iklim	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/ru piah	-	-	31.580, 25		39.475, 31		47.370, 37		55.265, 43		63.160, 49		63.160,49		
	Program	Cakupan	titik	14		20		20		20		20		20		100		Urusan Wajib
L	Trogram	Сакаран	UUK	7-4	l .	20	l		l	20	l		l	20	l	100	l	Crusari wajib

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pemantauan dan pengendalian kualitas air	sungai				2.500		2.500		6.000		6.000		2.500		19.500	Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kot a	15/5		20/5		40/8		50/10		50/10		50/10		50/10		
		Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	6,84	5,57	4,54		3,70		3,01		2,45		2,00		2,00		
		Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen			60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		80,00		
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	-	-	12	305	12	350	12	500	12	500	12	500	60	2.155	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasankawasa n Konservasi Laut dan Hutan	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi	-	-	1	1.000	1	1.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	5	47.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen			60	500	65	500	70	500	75	500	80	500	80	2.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Persentase	persen			20		25		30		35		40		40		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kin Akhir P RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20)21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi																
		Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen			30		35		40		45		50		50		
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang		12	12	1.500	12	2.000	12	2.000	16	2.000	20	2.000	20	9.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang		2	-		-		1		2		2		5		
S19	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	rasio	23,93	24,85	25,80		26,79		27,82		28,89		30,00		30		
	secara berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	1,29	1,48	1,71		1,97		2,26		2,61		3,00		3		
		Laju Deforestasi	ribu hektar	48,6	43,50	38,94		34,86		31,20		27,93		25,00		25		
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp milyar	2.051,7	2.120,4 5	2.191,4 4	1.800	2.264,8	2.000	2.340,6	2.200	2.419,0	2.400	2.500,0	2.500	2.500,00	10.900	Urusan Pilihan Kehutanan
		Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun			10		10		10		10		10		50		
	Program Rehabilitasi Hutan dan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian	persen		26,41	27,09	21.955	27,79	23.000	28,51	25.000	29,24	27.000	30,00	30.000	30	126.95 5	Urusan Pilihan Kehutanan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	paian Kiner	ia Program	dan Keran	gka Pendar	aan			Kondisi Kin Akhir Pe RPJN Targ	eriode //D	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Lahan	keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan Rehabilitasi hutan	На		4.641,8	4.764.7		4.004.0		5.011.0		F 140 F		5 272 4		3,000,00		
		dan lahan kritis	на		4.641,8	4.761,7 7		4.884,8 3		5.011,0 7		5.140,5 7		5.273,4 2		3.000,00		
		Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen		5	10		15		20		25		30		30		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Luasan tutupan kawasan konservasi	На	7.755.2 84	7.755.2 84	7.755.2 84	9.500	7.755.2 84	10.000	7.755.2 84	11.000	7.755.2 84	12.500	7.755.2 84	12.500	7.755.284	55.500	Urusan Pilihan Kehutanan
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen			30	45.127	35	50.000	40	52.000	45	56.000	50	59.000	50	262.12 7	Urusan Pilihan Kehutanan
	Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Cakupan legalitas hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat	persen			10	1.000	15	1.300	20	1.600	25	1.900	30	2.000	30	7.800	Urusan Pilihan Kehutanan
	Program Pencegahan Deforestasi	Persentase implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lestari	persen			40	3.500	45	400	50	4.000	55	5.000	60	5.000	60	17.900	Urusan Pilihan Kehutanan
S20	Membangun struktur perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	persen	8,00	8,30	8,62		8,94		9,28		9,63		10,00		10		
	yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai	Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	persen	1,94	2,19	2,47		2,79		3,14		3,55		4,00		4		
	tambah yang	Jumlah kawasan	Jumlah	0	0	1		1		2		2		4		10		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	paian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20)20	20	021	20)22	20	023			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	optimal dan berkelanjutan	industri rakyat yang dikembangkan																
		Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	52	53,66	54,88		56,11		57,38		58,68		60,00		60		
		Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	3428	3517	3609		3703		3799		3898		4000		4000		
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	900,57	980,50	1067,5 2		1162,2 6		1265,4 2		1377,7 2		1500,0 0		1500		
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2,20	2,41		2,65		2,90		3,19		3,50		3,5		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit			30	2.053	30	2.333	30	3.000	30	3.000	30	3.333	150	13.719	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali			5	2.380	5	3.000	8	3.000	8	3.000	10	3.000	36	14.380	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelomp ok			10		10		10		10		10		50		
		Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan	Rp milyar	10.156	10.838	11.566		12.343		13.171		14.056		15.000		15.000		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen		60	60	3.825	65	4.000	65	4.000	70	4.000	75	4.000	75	19.825	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pi	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarş	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Koperasi																	Usaha Kecil dan Menengah
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan penyelesaian permasalahan- permasalahan pengaduan konsumen	persen			80	1.410	80	1.500	85	1.500	85	1.500	90	1.500	90	7.410	Urusan Pilihan Perdagangan
		Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen			100		100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	2.008,1	2.147,0 5	2.295,6 1	2.100	2.454,4 4	2.205	2.624,2 7	2.315	2.805,8 6	2.431	3.000,0	2.553	3.000,00	11.604	Urusan Pilihan Perdagangan
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit			20	529	20	2.500	20	5.000	20	5.000	20	5.000	100	18.029	Urusan Pilihan Perdagangan
		Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen			2,50		3,00		3,25		3,50		4,00		4,00		
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha			50	6.447	50	9.092	50	9.092	50	10.000	50	10.000	250	44.631	Urusan Pilihan Perindustrian
		Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasa n			1		1		1		1		1		5		
	Program Pengembangan Destinasi	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destina si		10	10	9.476	12	16.000	12	25.000	15	25.000	15	31.258	15	106.73 4	Urusan Pilihan Pariwisata

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	ia Program	dan Keran	gka Pendar	aan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Pariwisata																	
		Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasa n		2	1		1		1		1		1		5		
	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusa haan			10	1.579	10	1.700	10	1.700	10	1.700	10	1.700	50	8.379	Urusan Pilihan Pariwisata
	Program pengembangan kapasitas	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang			50	1.235	50	1.500	50	1.500	50	1.500	50	1.500	250	7.235	Urusan Pilihan Pariwisata
		Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengus aha			10		10		10		10		10		50		
S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	4,53	5,33	6,27		7,37		8,67		10,20		12,00		12		
	maritim dan kelautan yang	NTP perikanan tangkap	Skor	103,75	103,96	104,17		104,37		104,58		104,79		105,00		105		
	berbasis pada pendayagunaan	NTP perikanan budidaya	Skor	83,27	85,85	88,51		91,25		94,08		96,99		100,00		100		
	potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapi ta/bula n	0,22	0,33	0,49		0,74		1,10		1,65		2,46		2,46		
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Persentase meningkatknya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	persen			1,25	5.350	1,50	6.000	1,75	6.200	1,80	6.500	2,00	7.000	2,00	31.050	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kin Akhir Pe RPJN Targ	eriode MD	Urusan Kewenangan
140	Pembangunan					20	19	20	20	20)21	20)22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kot a	-	-	8		10		13		13		13		13		
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton	113	118,46	124,19	2.553	130,19	3.000	136,49	3.000	143,08	3.000	150,00	3.000	150,00	14.553	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	7.403,0 0	7.499,3 1	7.596,8 8	583	7.695,7 1	1.000	7.795,8 3	5.000	7.897,2 6	5.000	8.000,0	5.000	8.000,00	16.583	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	37.811, 51	39.613, 97	41.502, 35	979	43.480, 75	1.100	45.553, 46	1.100	47.724, 97	1.100	50.000,	1.100	50.000,00	5.379	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	6.787,6 8	6976,1 5	7169,8 6		7368,9 5		7573,5 7		7783,8 6		8000,0 0		8000		
	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	persen			2	16.154	2	17.000	4	50.000	4	50.000	8	50.000	20	183.15 4	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase kenaikan pemasaran hasil produksi perikanan	persen			2,5	300	2,5	600	2,75	1.200	3,00	1.200	3,00	1.200	3,00	4.500	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	paian Kiner	ia Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
110	Pembangunan					20	19	20)20	20)21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen			1,20	11.715	1,50	12.000	2,00	12.000	2,25	12.000	2,50	12.000	2,50	59.715	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
S22	Meningkatnya	Tingkat Partisipasi	persen	76,94	77,44	77,95		78,46		78,97		79,48		80,00		80,00		
	daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Angkatan Kerja Tingkat Kesempatan Kerja	persen	96,01	97,09	97,34		97,59		97,84		98,09		98,34		98,34		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen			80	500	80	550	85	2.000	85	2.000	90	2.000	90	7.050	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen			25		25		30		40		50		50		
		Persentase kenaikan UMP	persen			1,5		1,5		2,3		3,5		4,0		4,0		
		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen			30		35		40		50		60		60		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	76,94	77,44	77,95	300	78,46	500	78,97	500	79,48	500	80,00	500	80,00	2.300	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	paian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kin Akhir Pe RPJN Targ	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Tingkat pengangguran	persen	3,62	2,91	2,70		2,50		2,32		2,16		2,00		2,00		Kerja
	Program Pengawasan Ketenagakerjaa n	terbuka Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	persen			40	750	45	750	50	750	55	750	60	750	60	3.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen			60		65		70		75		80		80		- 7.
S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. juta	52.510. 304	54.401. 000	56.360. 000		58.389. 000		60.491. 000		62.669. 000		64.926. 000		64.926.36		
	investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp.juta	70.038. 818	73.744. 000	77.645. 000		81.753. 000		86.078. 000		90.632. 000		95.427. 000		95.425.87 2		
		Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	90	90	80		60		40		30		20		20		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen		6,5	6,5	310	7,0	1.000	7,0	1.500	7,5	2.000	7,5	2.500	7,5	7.310	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
		Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen			15		20		25		30		35		35		Model
		Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasion	kali			5		5		5		5		5		25		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarį	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		al																
		Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasion al	persen			40		50		60		70		80		80		
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari		60	40	500	30	1.000	20	1.000	10	1.500	10	1.500	10	5.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
		Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor		65	66,68		68,40		70,17		71,98		73,84		77,25		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Proporsi biaya transaksi dalam total investasi	persen			5,0	500	2,5	1.000	2,0	1.000	1,5	1.000	1,0	1.000	1,0	4.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen			65		70	500	75	500	80	500	85	500	85	2.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
T5	Mewujudkan percepatan	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	229,82	224,56	219,42		214,39		209,48		204,69		200,00		200,00		
	pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna	Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Katego ri			С		С		С		В		В		В		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	ia Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Targ	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar																	
S24	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang tehubung sarana transportasi jalan Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	persen persen	30 20	55,17 30 20	58,62 32 25		40		72,41 45 35		79,31 50 40		93,10 55 45		93,10 55 45		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km m'			20	550.94 7	20	570.55 0	20	907.50	20	967.24 8	20	1.074.9 28	100	4.022.6 76	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan	yang fungsional Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen			34	80.000	38	80.000	40	85.000	45	90.000	50	95.000	55	422.50 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	persen			40		45		50		55		60		60		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			RPJ	nerja Pada Periode MD get	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km			10	574.33 5	20	579.00 0	20	839.04 5	20	899.00 0	30	919.00 0	100	3.810.3 80	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap	meq			30		30		30		30		30		150		
	Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen			60	51.000	65	51.000	70	51.000	75	51.000	80	51.000	80	255.00 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan terintegrasinya antarmoda angkutan antarwilayah adat	wilayah adat		1	1	6.000	2	6.600	2	9.000	3	10.000	3	11.000	3	42.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen		20	20	3.000	25	3.000	30	5.000	35	8.000	40	9.000	40	28.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa		200	180		160		140		120		100		100		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit		7	1	60.000	1	150.00 0	1	240.00 0	1	280.00 0	1	320.00 0	5	1.050.0 00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit		5	1		1		1		1		1		5		
		Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit		6	-		-		1		-		1		2		
		Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit		3	2		2		2		2		2		10		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran _i	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen		5,0	5,0		6,0		6,0		7,0		7,0		7,0		
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen			2,5		3,0		3,5		4,0		4,5		4,5		
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen			60	2.500	65	2.500	70	2.500	75	2.500	80	2.500	80	12.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
S25	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen			30		35		40		45		50		50		
	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan ketersediaan dokumen perecanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	n.a	n.a	60	750	70	1.000	80	1.000	90	1.000	100	1.000	100	4.750	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program pengendalaian dan pemanfaatan ruang	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	n.a	n.a	80	1.000	85	1.000	90	1.000	95	1.000	100	1.000	100	5.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
S26	Meningkatnya Ketersediaan sistem	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	n.a	n.a	60		65		70		75		80		80		
	pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Persentase pengendalian daya rusak air	persen	n.a	n.a	40		45		50		55		60		60		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20)21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Cakupan keterlayanan air baku	persen			30	1.000	35	2.000	40	5.000	45	7.000	50	9.000	50	24.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	38,47	40,19	41,98	45.800	43,86	50.000	45,82	55.000	47,86	60.000	50,00	60.000	50	270.80 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besa	persen	69,16	70,86	72,60		74,38		76,21		78,08		80,00		80		
	Program Pengendalian Banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	n/a	n/a	30	100.00	35	100.00	40	100.00	45	100.00	50	100.00	50	500.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	n/a	n/a	50		55		60		65		70		70		J
	Program Pembangunan turap/talud/broj ong	Persentase turap/talud/bronjon g yang berfungsi baik dalam mencegah longsor di tebing jaln/sungai	persen	n/a	n/a	90	21.000	95	22.000	100	40.000	100	40.000	100	25.000	100	115.00 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong -gorong	Persentase genangan air permukaan yang dapat turunkan	persen	n/a	n/a	85	50.300	85	50.000	90	73.000	90	50.000	90	50.000	90	273.30 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
S27	Meningkatnya	Cakupan rumah	persen	33,06	34,12	35,22		36,36		37,54		38,75		40,00		40		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Pemenuhan perumahan	tangga dengan sanitasi baik																
	layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	38,47	39,52	40,61		41,72		42,87		44,04		45,25		45,25		
		Backlog perumahan layak huni	ribu ruta	147,88	138,55	129,80		121,61		113,93		106,74		100,00		100,00		
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen			60	100.00	65	110.00	70	200.00	75	230.00	80	250.00 0	80	890.00 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Cakupan rumah layak huni yang terbangun	unit			3000		3000		3000		3000		3000		15000		remukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen			30	10.589	35	12.500	40	12.500	45	14.000	50	17.000	50	66.589	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program Pelayanan Air Bersih	Cakupan rumahtangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk			125	250	180	2.000	230	3.000	300	4.000	380	4.000	380	13.250	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
S28	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	40,57	41,28	41,99		42,73		43,47		44,23		45,00		45		
	Program	Tingkat elektrifikasi	persen	53,20	54,28	55,38		56,50		57,64		58,81		60,00		60		Urusan Pilihan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan Daerah	Destriesi	Catalan		1	20	19	20)20	20	021	20	22	20)23		1	
	Daeran	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi						10.000		20.000		75.000		90.000		100.00		295.00 0	Energi dan Sumberdaya Mineral
		Persentase kampung terakses listrik	persen	43	45,46	48,05		50,79		53,69		56,76		60,00		60		
	Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumaht angga					250,00	1.000	250,00	5.000	250,00	5.000	250,00	5.000	1250,00	16.000	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumaht angga			500		500		500		500		500		2500		
		Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampu ng			100		100		100		100		100		500		
S29	Meningkatnya jangkauan	Cakupan layanan telekomunikasi	persen			40		45		50		55		60		60		
	pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen			5		7,25		7,5		8		10		10		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program	Persentase penduduk yang mengakses internet Cakupan SDM	persen	16,51	17,05	17,60	4.000	18,17	13.733	18,76	17.100	19,37 75	18.833	20,00	20.500	20,00	74.167	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Urusan Wajib

Program Pembangunan		ogram		Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Akhir P RPJI Tar	MD	Urusan Kewenangan
					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23		,	
Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi					1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		5.000	Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
MISI KELIMA	A, PERCEPATAN	PEMBA	NGUNA	N DAE	RAH TE	RTINGG	AL, TEF	RDEPAN	, TERLU	JAR DA	N TERTI	NTU					
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	5,37	6,94	8,97		11,59		14,97		19,35		25,00		25,00		
	Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago	persen	32,32	31,78	31,25		30,71		30,23		29,72		29,23		29,23		
	Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri	persen	30,12	29,80	29,47		29,15		28,81		28,48		28,16		28,16		
	Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago	persen	36,30	35,89	35,48		35,04		34,60		34,20		33,80		33,80		
	Indeks Williamson Antarwilayah Adat	indeks	0,8316	0,7774	0,7544		0,6907		0,6255		0,6067		0,5640		0,5640		
	IPM wilayah perbatasan	indeks	63,25	64,02	64,79		65,58		66,38		67,18		68,00		68,00		
	Tingkat Kerentanan Sosial	katego ri	Tinggi	Tinggi	Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Renda h		Rendah		
	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,517	0,508	0,500		0,491		0,483		0,475		0,467		0,467		
Meningkatnya	Indeks kamnung	indeks	4 1 89	43.43	45.02		46 67		48 38		50.16		52.00		52		
kualitas	membangun		. 2,03	·	·		·		,		Í		·				
pembangunan berbasis kampung	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen		30	34,46		39,59		45,47		52,23		60,00		60		
	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi MISI KELIMA Meningkatkan pemerataan pembangunan Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi MISI KELIMA, PERCEPATAN Meningkatkan pemerataan pembangunan Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago Indeks Williamson Antarwilayah Adat IPM wilayah perbatasan Tingkat Kerentanan Sosial Indeks Ketimpangan Gender Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung kampung kampung Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi kompeten di bidang teknologi informasi komunikasi dan Informasi kenologi informasi persen kenologi informasi persen persen kenologi informasi persen persen persen persen kenologi informasi persen persen persen persen persen kenologi informasi persen persen persen persen persen informasi kenologi informasi persen persen persen persen informasi kenologi informasi kenologi informasi infor	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi MISI KELIMA, PERCEPATAN PEMBANGUNA Meningkatkan pemerataan pembangunan Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago Indeks Williamson Antarwilayah Adat IPM wilayah Wilayah perbatasan Tingkat Kerentanan katego Tinggi ri Indeks Ketimpangan Gender Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung Moningkatnya kampung membangun Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi MISI KELIMA, PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAE Meningkatkan pemerataan pembangunan Perkembang Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago Indeks Williamson Antarwilayah Adat IPM wilayah Jasar Perbatasan Tingkat Kerentanan Sosial Indeks Ketimpangan Gender Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung masyarakat pesisir dan pulau-pulau persen 30 masyarakat pesisir dan pulau-pulau persen 32,32 masyarakat pesisir dan persen 32,32 masyarakat pesisir dan persen 32,32 masya	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi kompeten di bidang teknologi informasi komunikasi dan Informasi kompeten di bidang teknologi informasi komunikasi dan Informasi kompung persen S,37 6,94 8,97 Meningkatkan pemerataan pembangunan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago Indeks Williamson Antarwilayah Adat IPM wilayah Indeks G3,25 64,02 64,79 perbatasan Tingkat Kerentanan Sosial Indeks Ketimpangan indeks O,517 O,508 O,500 Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung Meningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Penengkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Penengkatan Informasi Penengkatkan pemerataan pembangunan Pembangunan Persen Spara Saireri Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago Indeks Williamson Antarwilayah Adat IPM wilayah Jindeks G3,25 G4,02 G4,79 persen Soial Indeks Kerimpangan Gender Indeks Kempangan Gender Indeks kampung Indeks Mata Indeks Kerentanan Sosial Indeks Kerimpangan Gender Indeks kampung Indeks Mata Indeks Kempangan Gender Indeks Kempangan Gender Indeks Mata Indeks I	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Romunikasi dan Romunik	Rominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	Reningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi MISI KELIMA, PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLU Meningkatkan pemerataan pembangunan pembangunan pembangunan Indeks Williamson Antarwilayah Adat IPM wilayah Lapago Indeks Williamson Antarwilayah Adat IPM wilayah Indeks (5,325 (6,94) (2,947) (2,945) (3,94	Peningkatran Komunikasi dan Informasi	Fasilitasi	Fasilitasi	Fasilitasi	Fasilitasi	Reinigkatan Skominfo yang kennogkatan Skominformasi Skominfo yang kennogkatan Skominfo yang kennogkatan Skominfo yang kennogkatan Skominfo yang kennogkatan Skominformasi Skominfo yang kennogkatan Skominfo yang kennogkatan Skominfo yang kennogkatan Skominfo yang kennogkatan Skominformasi Skomin	Remingkatkan Remingkathan Remi

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram	Kondisi Awal	Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen			25	10.000	30	12.000	35	25.000	40	25.000	45	25.000	45	97.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	kampu ng			10		10		10		10		10		50		
		Persentase kampung tertinggal	persen		87,12	84,55		82,05		79,63		77,28		75,00		75,00		
		Persentase kampung mandiri	persen		10	2		2		4		4		5		17		
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampu ng			10	2.700	10	3.000	10	15.000	10	20.000	10	20.000	50	39.700	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen			10		15		20		25		30		30		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen			60	4.856	65	10.000	70	10.000	75	10.000	80	10.000	80	44.856	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Cakupan nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	Per 1000 nelaya n	127,36	173,00	234,99		319,20		433,58		588,95		800,00		800		
S31	Meningkatnya	Persentase	persen		60,00	62,40		64,90		67,49		70,19		73,00		73,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	a Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20)20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	pemenuhan kebutuhan dasar OAP																
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen			40	1.500	43,51	1.650	47,33	1.815	51,48	1.997	56,00	2.196	56	9.158	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen			85	2.750	88,52	3.025	92,20	3.328	96,02	3.660	100,00	4.026	100	16.789	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen			2,15		1,70		1,35		1,07		0,85		0,85		
		Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen			1,22		0,82		0,55		0,37		0,25		0,25		
	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang Iulus dengan nilai UAN di atas rata- rata	persen			35	57.970	40,05	60.000	45,83	75.000	52,44	75.000	60,00	75.000	60	342.97 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Cakupan siswa Iulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP			200		200		200		200		200		1000		
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen			45	1.500	48,36	4.150	51,96	4.465	55,84	3.812	60,00	4.193	60	18.119	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen			25	500	28,12	500	31,62	500	35,57	500	40,00	500	40	2.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Keran	gka Pendai	naan			Kondisi Kii Akhir P RPJ Tar	Periode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen			60		63,44		67,08		70,93		75,00		75		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen			40	150	46,01	500	52,92	750	60,86	750	70,00	750	70	2.900	Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen			30	100.00	32,24	110.00	34,64	175.00 0	37,22	200.00	40,00	200.00	40	785.00 0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen			20	5.500	14,14	6.667	10,00	7.333	7,07	8.333	5,00	9.000	5	36.833	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarg a			250	127.65 2	250	130.00 0	250	175.00 0	250	200.00	250	225.00 0	1250	857.65 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen			250	1.410	225	1.500	200	1.500	175	1.500	150	1.500	150	7.410	Urusan Pilihan Perdagangan
		Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumahtangga	persen	12,52	12,94	13,37		13,82		14,28		14,76		15,25		15,25		
S32	Meningkatnya	Rata-rata Lama	tahun	7,48	8,09	8,75		9,47		10,25		11,09		12,00		12		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20)20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	percepatan pembangunan	Sekolah wilayah perbatasan																
	wilayah perbatasan	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	65,08	65,56	66,04		66,53		67,01		67,50		68,00		68		
		Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9,49	10,12	10,80		11,52		12,30		13,12		14,00		14		
	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Cakupan Pos Lintas Batas yang berstandar internasional	lokasi		2	1	7.000	1	7.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	5	52.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
		Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	persen			45		50		55		60		65		65		Pemerintahan
		Cakupan Ketersediaan sekolah di perbatasan	murid per sekolah	97,87	100	150		175		200		225		250		250		
		Cakupan Ketersediaan guru di perbatasan	murid per guru	14,90	15	15		20		20		25		25		25		
		Cakupan Ketersediaan kelas di perbatasan	murid per kelas	13,88	14	20		25		30		35		40		40		
	C C K F F F F F F F F	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan	puskes mas per 1000 pendud uk	0,34	0,34	0,40		0,50		0,60		0,70		0,80		0,80		
		Cakupan Ketersediaan Sarana	persen			30		35,68		42,43		50,45		60,00		60		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Ca _l	oaian Kiner	ja Program	dan Keran _i	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi	persen			40		42,29		44,72		47,29		50,00		50		
	Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	di perbatasan Cakupan kerjasama antara negara di kawasan perbatasan yang diimplementasikan	persen			80	500	85	1.000	90	1.000	95	1.000	100	1.000	100	4.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen			30	305.02 9	50	250.00 0	70	345.62 0	100	320.00 0	100	320.00 0	100	1.540.6 49	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen			30	-	50	1.000	70	1.000	100	1.000	100	1.000	100	4.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	-	-	50		50		50		50		50		250		
	sosial PMKS	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	-	-	10		20		30		40		50		150		
	Program Pemberdayaan	Persentase KAT yang memperoleh	persen			40	4.200	45	5.000	50	7.000	55	7.500	60	7.500	60	31.200	Urusan Wajib Pelayanan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	a Program	dan Kerang	gka Pendar	aan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	bantuan sosial																Dasar Sosial
	Lamiya	Persentase PMKS yang tertangani	persen			30		35		40		45		50		50		
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	25,00	28,51	32,51		37,08		42,29		48,23		55,00		55,00		
		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK			200		200		200		200		200		1000		
		Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen			70		75		80		85		90		90		
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen			65		70		75		80		85		85		
		Cakupan ketersediaan basis	persen			80		85		90		95		100		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	a Program	dan Keranş	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tarj	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan		_			20)19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		data terpadu PMKS dan kemiskinan																
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen			30	500	35	1.000	40	1.100	45	1.500	50	1.600	50	5.700	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen			15		20		25		30		35		35		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kot a		9	12	127.65 2	15	130.00	18	175.00 0	21	200.00	24	225.00 0	24	857.65 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang			50	5.650	50	6.000	50	6.000	50	6.000	50	6.000	250	29.650	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Jumlah anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang			250		250		250		250		250		1250		
		Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen			30		35		40		45		50		50		
		Cakupan Jumlah	persen		I	60		65	L	70	L	75	l	80	1	80	<u> </u>	

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kinerj	ia Program	dan Keran	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20	21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial																
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokum en			2	500	2	500	2	-	2	-	2	-	10	1.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Katego ri		Tinggi	Tinggi		Tinggi		Sedang		Sedang		Rendah		Rendah		
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen			60	500	65	15.000	70	15.000	75	16.000	80	17.000	80	63.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi			2		2		2		2		2		10		iviasyai anat
1	1	Persentase	persen			80		85		90		95	1	100		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		Kinerja RJMD			Cap	oaian Kinerj	a Program	dan Keranք	gka Pendan	naan			Kondisi Kin Akhir P RPJI Targ	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan	Bull day	6-1			20	19	20	20	20	21	20	22	20	23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		kesiapsiagaan penanganan bencana																
		Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen			80		80		90		90		100		100		
		Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen			20		25		30		35		40		40		
		Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen			80		85		90		95		100		100		
S35	Meningkatnya Pengarusutama an Gender	Indeks Pembangunan Gender	indeks	492	423	364		313		269		232		200		200		
	dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	79,38	79,48	79,59		79,69		79,79		79,90		80,00		80		
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak	Proporsi perempuan di Legislatif	persen	12,73	12,73	20	1.733	20	1.800	20	1.800	20	1.800	20	1.800	20	8.933	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupani	per 100		10	10		15		20		25		30		30		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сар	oaian Kiner	a Program	dan Keranş	gka Pendar	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJ Tar	eriode MD	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20)19	20	20	20	21	20)22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		perempuan yang berada di posisi pimpinan	laki-laki															
		Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	kasus	98	80	66		54		44		36		30		30		
		Persentase kasus Trafficking dan Eksploitasi anak	persen	7,73	4,90	3,10		1,97		1,25		0,79		0,50		0,5		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	per 1000 perem puan	51,00	46,68	42,73	2.500	39,12	2.500	35,80	2.500	32,77	2.500	30,00	2.500	30,00	12.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Implementasi kebijakan yang responsif gender	persen			60		70		80		90		100		100		
		Persentase Posyandu Aktif	persen	85,71	87,19	88,70		90,24		91,80		93,38		95,00		95,00		
		Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung	persen			70		80		90		100		100		100		
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang	orang			150	2.700	150	2.700	150	2.700	150	2.700	150	2.700	750	13.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan	persen			40		60		80		100		100		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr	ogram		i Kinerja RJMD			Сај	oaian Kiner	ja Program	dan Keran	gka Pendai	naan			Kondisi Kir Akhir P RPJI Tar	eriode VID	Urusan Kewenangan
	Pembangunan					20	19	20	20	20)21	20	22	20)23			
	Daerah	Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I																
		Persentase PKK aktif	persen			80		85		90		95		100		100		
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang	orang			150	1.306	150	1.400	150	1.400	150	1.400	150	1.400	750	6.906	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I	persen			40		60		80		100		100		100		

DAFTAR ISI

BAB	VI	STRATEGI,	ARAH	KEBIJAKAN	DAN	PROGRAM
	PEME	BANGUNAN DA	AERAH	•••••	•••••	VI.1
6.1 8	STRATE	GI PEMBANGUNA	N DAERAH	Ŧ	•••••	VI.2
				oangunan		
				•••••		
				•••••		
6.2. .	Arah K	ebijakan	•••••	•••••		VI.7
				nbangunan		
	6.2.2	Arah Pembangu	nan Kewila	ıyahan		VI.27
6.3.	Priorita	s Pembangunan d	lan Prograr	n Prioritas	•••••••	VI.47
DAFT	AR ISI					153
D/11/1/	att IoI.	•••••	••••••	••••••	•••••	100
DAFT	AR TA	BEL				154

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	
Provinsi Papua Tahun 2018-2023VI	[.9
Tabel 6.2. Target KewilayahanVI.2	29
Tabel 6.3. Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah Provinsi PapuaVI.3	32
Tabel 6.4. Peningkatan Akses dan Kualitas PendidikanVI.3	33
Tabel 6.5. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sarana Kesehatan dalam	
Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di PapuaVI.3	34
Tabel 6.6. Pengembangan Perekonomian WilayahVI.3	37
Tabel 6.7. Pengembangan Wilayah PerbatasanVI.4	45
Tabel 6.8. Prioritas Program Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-	
2023VI.4	49
Tabel 6.9. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1. Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018	3~
2023	VI.2
Gambar 6.2 Pendekatan Pembangunan Daerah	VI 6
Gambar 6.3. Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023	VI 7
Gambar 6.4. Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua	VI 27
Gambar 6.5. Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua	VI 31
Gambar 6.6. Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua	VI 36
Gambar 6.7. Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua	VI 38
Gambar 6.8. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mamta	VI 39
Gambar 6.9. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Saereri	VI 40
Gambar 6.10.Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mee Pago	VI 41
Gambar 6.11.Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat La Pago	VI 43
Gambar 6.12. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Anim Ha	VI 44
Gambar 6.13. Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah	VI 47